



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

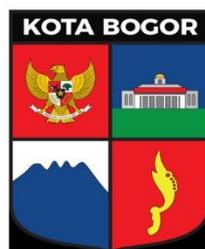
Menuju Masyarakat Informasi Indonesia



DOKUMEN 3

EXECUTIVE SUMMARY

RENCANA INDUK SMART CITY KOTA BOGOR



PEMERINTAH KOTA BOGOR

2022

Dokumen 3

EXECUTIVE SUMMARY

RENCANA INDUK *SMART CITY*

KOTA BOGOR

PEMERINTAH KOTA BOGOR

2022

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
1.LATAR BELAKANG	1
1.1.Pendahuluan	1
1.2.Tentang Kota Bogor.....	2
1.3.Tujuan	5
1.4. Kerangka Pikir	6
1.5. Keterhubungan <i>Rencana Induk Smart City</i> dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	9
1.5.1.Keterhubungan <i>Rencana Induk Smart City</i> dengan RJPMD	9
1.5.2.Keterhubungan <i>Rencana Induk Smart City</i> dengan SNI ISO 37120:2019 ..	12
1.5.3.Keterhubungan <i>Rencana Induk Smart City</i> dengan SNI ISO 37122:2019 ..	13
1.5.4.Keterkaitan Rencana Induk <i>Smart City</i> dengan Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021	14
1.5.5.Keterhubungan <i>Rencana Induk Smart City</i> dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).....	19
2. VISI SMART CITY KOTA BOGOR	20
3. STRATEGI PEMBANGUNAN SMART CITY KOTA BOGOR	24
3.1. <i>Smart Governance</i>	24
3.2. <i>Smart Branding</i>	31
3.3. <i>Smart Economy</i>	37
3.4. <i>Smart Living</i>	44
3.5. <i>Smart Society</i>	50
3.6. <i>Smart Environment</i>	57
4. PETA JALAN SMART CITY	61
4.1. Peta Jalan <i>Smart Governance</i>	62
4.1.1. Peta Jalan <i>Smart Governance</i> Untuk Jangka Pendek Dan Jangka Menengah.....	62

4.2. Peta Jalan <i>Smart Branding</i>	68
4.2.1. Peta Jalan <i>Smart Branding</i> untuk Jangka Pendek dan Jangka Menengah ..	68
4.3. Peta Jalan <i>Smart Economy</i>	73
4.3.1. Peta Jalan <i>Smart Economy</i> untuk Jangka Pendek dan Jangka Menengah ..	73
4.4. Peta Jalan <i>Smart Living</i>	79
4.4.1. Peta Jalan <i>Smart Living</i> untuk Jangka Pendek dan Jangka Menengah	79
4.5. Peta Jalan <i>Smart Society</i>	85
4.5.1. Peta Jalan <i>Smart Society</i> untuk Jangka Pendek dan Jangka Menengah.....	85
4.6. Peta Jalan <i>Smart Environment</i>	91
4.6.1. Peta Jalan <i>Smart Environment</i> untuk Jangka Pendek dan Jangka Menengah	91
5. PENUTUP.....	96

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 2	Peta Wilayah Kota Bogor	4
Gambar 1. 3	Elemen <i>Smart City Readiness</i>	6
Gambar 1. 4	Enam Dimensi <i>Smart City</i>	7
Gambar 1. 5	Kerangka Keterkaitan antara Sasaran <i>Smart City</i> dengan RPJMD	9
Gambar 1. 6	Kerangka Kodifikasi Program <i>Smart City</i>	10
Gambar 1. 7	Hubungan Antar Standar Indikator Perkotaan	12
Gambar 4. 1	Peta Jalan <i>Smart Governance</i> Jangka Pendek dan Menengah Kota Bogor	62
Gambar 4. 2	Peta Jalan <i>Smart Branding</i> Jangka Pendek dan Jangka Menengah Kota Bogor	68
Gambar 4. 3	Peta Jalan <i>Smart Economy</i> Jangka Pendek dan Jangka Menengah Kota Bogor	73
Gambar 4. 4	Peta Jalan <i>Smart Living</i> Jangka Pendek dan Jangka Menengah Kota Bogor	79
Gambar 4. 5	Peta Jalan <i>Smart Society</i> Jangka Pendek dan Menengah Kota Bogor	85
Gambar 4. 6	Peta Jalan <i>Smart Environment</i> Jangka Pendek dan Jangka Menengah Kota Bogor	91

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Strategi Dimensi <i>Smart Governance</i>	26
Tabel 3. 2 Strategi Dimensi <i>Smart Branding</i>	32
Tabel 3. 3 Strategi Dimensi <i>Smart Economy</i>	38
Tabel 3. 4 Strategi Dimensi <i>Smart Living</i>	45
Tabel 3. 5 Strategi Dimensi <i>Smart Society</i>	52
Tabel 3. 6 Strategi Dimensi <i>Smart Environment</i>	58
Tabel 4. 1 Peta Jalan Dimensi <i>Smart Governance</i> Untuk Jangka Pendek dan Jangka Menengah.....	63
Tabel 4. 2 Peta Jalan Dimensi <i>Smart Branding</i> Untuk Jangka Pendek dan Jangka Menengah.....	69
Tabel 4. 3 Peta Jalan Dimensi <i>Smart Economy</i> Untuk Jangka Pendek dan Jangka Menengah.....	74
Tabel 4. 4 Peta Jalan Dimensi <i>Smart Living</i> Untuk Jangka Pendek dan Jangka Menengah.....	80
Tabel 4. 5 Peta Jalan Dimensi <i>Smart Society</i> Untuk Jangka Pendek dan Jangka Menengah.....	86
Tabel 4. 6 Peta Jalan Dimensi <i>Smart Environment</i> Untuk Jangka Pendek dan Jangka Menengah.....	92

1. LATAR BELAKANG

1.1. Pendahuluan

Kota-kota di seluruh dunia semakin bertambah modern, kota harus merangkul teknologi baru dan menyikapi kedatangan era big data. Strategi bisnis baru akan segera bermunculan, dan perlu mengandalkan kolaborasi. Kota pintar atau *smart city* lambat laun akan mengubah kompetisi menjadi kolaborasi. Tren persaingan dunia adalah menuju daya saing kota atau daerah. Kota perlu menjadi pilihan masyarakat global dalam melakukan aktivitas investasi, perdagangan, wisata, kemitraan dan lain-lain. Pada saat yang sama, masyarakat harus mendapatkan lingkungan tempat tinggal yang layak (*livable*), inovatif dan berkelanjutan (*sustainable*). Tuntutan sebuah kota atau lingkungan yang nyaman, aman, sehat, mudah, dan berkemakmuran menjadi indikator kota yang berdaya-saing.

Berbicara mengenai teknologi, sangatlah erat dengan digitalisasi yang menjadi *enabler* urbanisasi. Dunia digital melebur migrasi fisik pola rural ke urban, perubahan gaya hidup dan interaksi *socio-cultural* adalah contoh nyata bagaimana digitalisasi berperan dalam perubahan. Masyarakat urban memiliki sistem kompleks di mana manusia, teknologi, dan lingkungan saling terhubung dan mempengaruhi. Masyarakat urban membawa tantangan baru seperti kemiskinan, kemacetan, kesenjangan sosial, kriminalitas, berkurangnya sumber daya alam, polusi, masalah kesehatan dan tantangan lainnya. Kota Bogor sudah semakin berubah. Saat ini Kota Bogor sudah menjadi magnet di kawasan Jabodetabekpunjur yang menyedot kaum urban dari berbagai wilayah Indonesia, sehingga membawa berbagai konsekuensi terhadap berbagai aspek sebagaimana umumnya situasi perkotaan, oleh karena itu perlu strategi dan pendekatan komprehensif, inklusif, efektif dan efisien untuk menghadapi tantangan tersebut. Salah satunya adalah membangun *Smart City*

Smart City menghubungkan manusia, sosial, dan infrastruktur TIK untuk mengatasi masalah publik, mencapai pembangunan berkelanjutan, dan meningkatkan kualitas hidup warganya. *Smart City* menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk

meningkatkan kemampuan hidup, kemampuan kerja, dan keberlanjutannya (*Smart City Council*, 2014). Konsep *Smart City* merupakan konsep yang unik dan dinamis. Ide yang muncul dari *Smart City* adalah solusi untuk permasalahan kota, menjadi unik dan dinamis karena solusi yang muncul tidak serta merta bisa diterapkan di kota lain. Ide dan Inovasi harus bisa diterapkan untuk memudahkan penyelesaian masalah dengan melibatkan pemanfaatan teknologi TIK, IoT (sensor) dan *data analytics* sebagai pendukung untuk pengambilan keputusan yang tepat. Pembangunan berbasis *Smart City* menyediakan ruang inovasi yang luas untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi oleh pemerintah daerah, masyarakat, pelaku bisnis, dunia pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) lain.

Kota Bogor telah memulai pembangunan *Smart City* sejak tahun 2017 dan memiliki panduan untuk mempersiapkan dan mengimplementasikan pembangunan *Smart City* dengan baik yang sesuai dengan karakter dan potensi yang dimiliki Kota Bogor. Perbaikan dan peningkatan layanan yang menghadirkan layanan digital berbasis kebutuhan masyarakat terus dilakukan, mengacu kepada tiga aspek penting *Smart City* yaitu, efisien, transparansi dan partisipasi. Kota Bogor berkomitmen membangun *Smart City* dan terus berproses menemukan pilihan dan konsep *Smart City* yang sesuai dengan Kota Bogor. *Smart City* harus membawa pelayanan publik lebih efisien dan transparan dan mendapatkan kontrol yang baik dari publik dalam setiap kegiatan, penggunaan APBD dan lainnya. Komitmen Kota Bogor dalam membangun *Smart City* menjadi latar belakang disusunnya Dokumen Rencana Induk 1 (*Masterplan Smart City*) Kota Bogor.

1.2. Tentang Kota Bogor

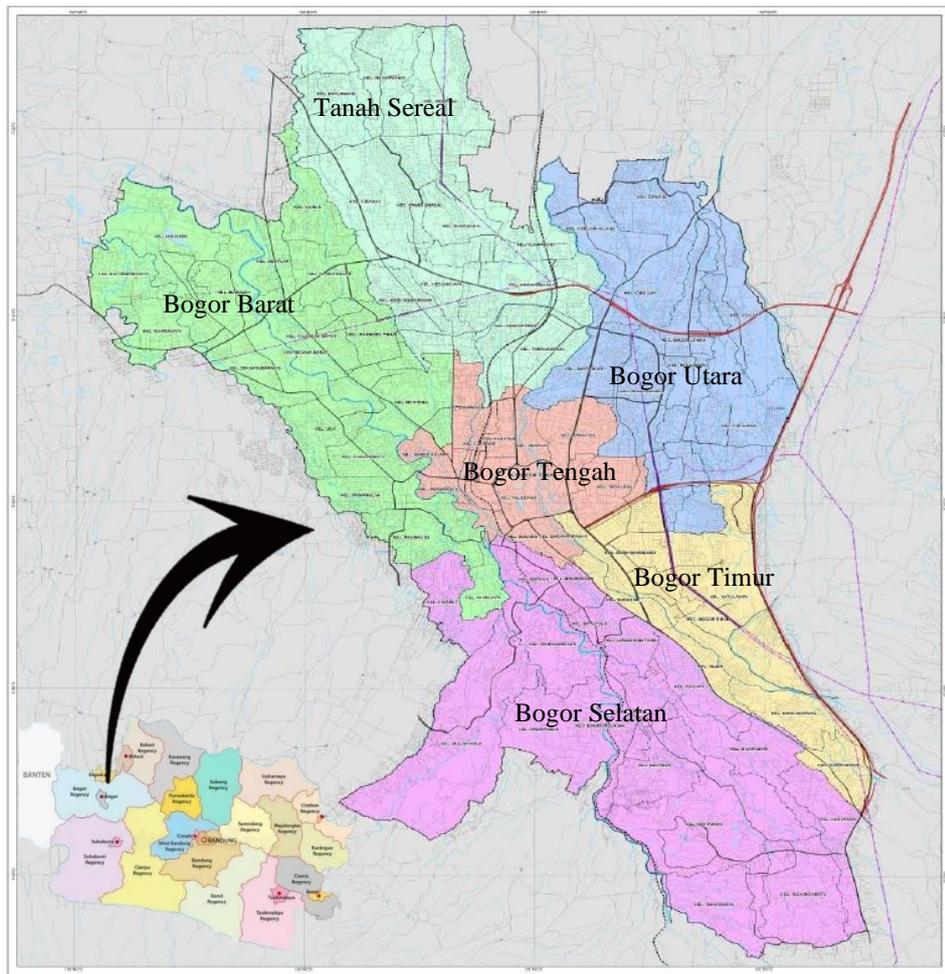
Secara geografis Kota Bogor terletak di antara 106° 48' BT dan 6° 26' LS, kedudukan geografis Kota Bogor cukup strategis berada di tengah-tengah wilayah Kabupaten Bogor dan sangat dekat Ibukota Negara. Lokasi strategis mendukung perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dan jasa, pusat kegiatan nasional untuk industri, perdagangan, transportasi, komunikasi, dan pariwisata.

Kota Bogor mempunyai rata-rata ketinggian minimum 190 m dan maksimum 330 m dari permukaan laut, dengan kondisi iklim yang memiliki suhu rata-rata tiap bulan 26° C dengan suhu terendah 21,8° C dengan suhu tertinggi 30,4° C. Kelembaban udara 70 %,

Curah hujan rata-rata setiap tahun sekitar 3.500 – 4.000 mm dengan curah hujan terbesar pada bulan Desember dan Januari.

Luas Wilayah Kota bogor sebesar 11.850 Hektar terdiri dari 6 kecamatan dan 68 kelurahan, 800 RW, 3.636 RT dan dikelilingi oleh Wilayah Kabupaten Bogor (Gambar 1.1), yaitu sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kemang, Bojong Gede, dan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sukaraja dan Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Darmaga dan Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor.
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan). Cijeruk dan Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor.



Gambar 1. 1 Peta Wilayah Kota Bogor

Sumber: RPJMD Kota Bogor 2019-2024

Kota Bogor mempunyai sejarah yang panjang dalam Pemerintahan, mengingat sejak zaman Kerajaan Pajajaran sesuai dengan bukti-bukti yang ada seperti dari Prasasti Batu Tulis, nama-nama kampung seperti Lawanggantung, Lawang Saketeng, Jerokuta, Baranangsiang dan Leuwi Sipatahunan. Pakuan diyakini sebagai Ibukota Pajajaran terletak di Kota Bogor. Pakuan dikenal sebagai pusat Pemerintahan Pajajaran pada pemerintahan Prabu Siliwangi (Sri Baduga Maharaja) yang penobatannya tepat pada tanggal 3 Juni 1482, yang selanjutnya ditetapkan oleh DPRD Kabupaten dan Kota Bogor di tahun 1973 sebagai hari jadi Bogor.

Dalam sistem perkotaan nasional, Kota Bogor ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Kota Bogor juga termasuk ke dalam Kawasan Strategis Nasional Perkotaan Jabodetabekpunjur sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 60 tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur. Dalam konteks regional, Kota Bogor merupakan kota penyangga ibukota yang diarahkan untuk menampung 1,5 juta jiwa penduduk pada tahun 2025 dalam rangka mengurangi tekanan kependudukan di Jabodetabek. Dalam konteks internasional, Kota Bogor merupakan salah satu cagar budaya dengan adanya Kebun Raya Bogor yang menjadi daya tarik wisatawan asing dan domestic¹

Smart City merupakan konsep yang diusung oleh pemerintah Kota Bogor sejak tahun 2017 dan merupakan kota pertama yang mengikuti program 100 *Smart City* di Indonesia². Melalui pembangunan *Smart City*, Kota Bogor menguatkan tiga identitasnya sebagai Bogor *Green City*, *Heritage City* dan *Smart City*.

1.3. Tujuan

Untuk membangun *Smart City* diperlukan usaha dan waktu yang panjang. Komitmen dan perencanaan yang matang perlu dilakukan secara menyeluruh, semua pihak di tingkat daerah maupun pusat, warga baik secara individu maupun komunitas, pemerintah, dan sektor swasta harus melibatkan diri dan berperan aktif.

Dokumen 1 ini berisi Analisis Strategis *Smart City* Kota Bogor, dengan maksud untuk menjadi dasar penyusunan Rencana Induk *Smart City* Kota Bogor dan Rencana *Quick Wins Smart City* Kota Bogor yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) dan perkembangan eksternal yang sedang berlangsung.

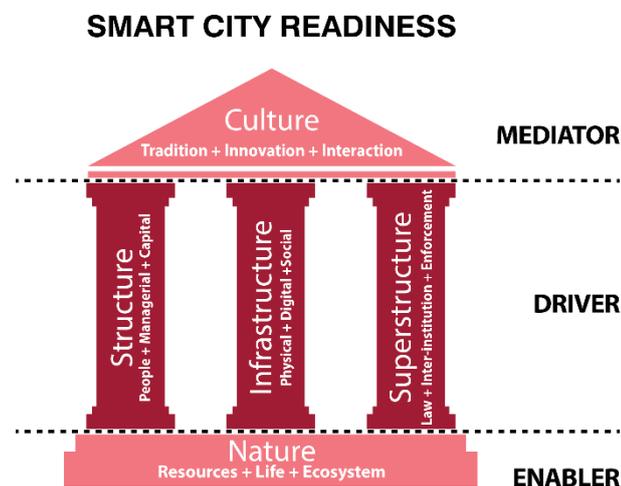
¹ perkotaan.bpiw.pu.go.id (2022). diakses: <http://perkotaan.bpiw.pu.go.id/v2/kota-besar/19>

² Susianti, Dede (2021).” Dinilai Jenuh, Bima Arya Evaluasi ‘*Smart City*’ Kota Bogor. diakses: <https://mediaindonesia.com/nusantara/409906/dinilai-jenuh-bima-arya-evaluasi-smart-citykota-bogor>

1.4. Kerangka Pikir

Kerangka pikir (*frameworks*) *Smart City* atau Kota Cerdas telah dikembangkan oleh banyak pakar dan akademisi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Beberapa lembaga seperti *Smart Cities Council*, CISCO, Uni Eropa, dan IEEE telah mengembangkan kerangka pikir terhadap pembangunan *Smart City*. Selain lembaga-lembaga tersebut terdapat kerangka pikir yang dikembangkan oleh lembaga *think tank* dalam negeri dimana kerangka pikir yang dikembangkan tersebut telah disesuaikan dengan konteks Indonesia.

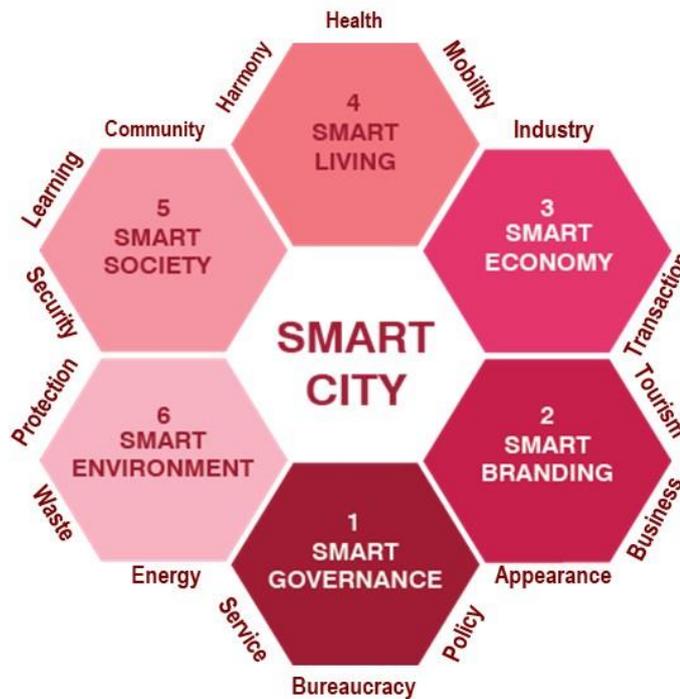
Dalam membangun *Smart City*, terlebih dahulu suatu kota/kabupaten harus memiliki Kesiapan Daerah Cerdas atau *Smart City Readiness*. Analisis kesiapan *Smart City* daerah merupakan analisis yang dilakukan untuk menilai kondisi daerah saat ini guna mendapatkan gambaran kapasitas dan kapabilitas daerah dalam menerapkan program-program pembangunan *Smart City*. Elemen-elemen *Smart City Readiness* adalah *Nature*, Struktur, Infrastruktur, Suprastruktur dan *Culture*. Ilustrasi elemen-elemen tersebut dapat dilihat pada **Kesalahan! Sumber referensi tidak ditemukan.** Untuk keperluan penyusunan *Rencana Induk* ini, kajian *Smart City Readiness* difokuskan kepada 3 elemen saja yaitu Struktur, Infrastruktur, dan Suprastruktur.



Gambar 1. 2 Elemen Smart City Readiness

Sumber: Citiasia Center for Smart Nation (CCSN).

Kerangka pikir berikutnya dari sebuah *Smart City* adalah dimensi-dimensi yang terdapat di dalam *Smart City* itu sendiri.



Gambar 1. 3 Enam Dimensi Smart City

Keenam dimensi tersebut adalah:

1. *Smart Governance*: gambaran tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan secara pintar, yaitu tata kelola pemerintahan yang mampu mengubah pola-pola tradisional dalam birokrasi sehingga menghasilkan *business process* yang lebih cepat, efektif, efisien, komunikatif dan selalu melakukan perbaikan. *Smart Governance* harus dapat diimplementasikan ke dalam tiga unsur dalam tata kelola, yaitu pelayanan (*service*), birokrasi (*bureaucracy*), dan kebijakan (*policy*).
2. *Smart Branding*, yaitu inovasi dalam memasarkan daerahnya sehingga mampu meningkatkan daya saing daerah dengan mengembangkan tiga elemen, yaitu pariwisata, bisnis, dan wajah kota. *Smart Branding* didasarkan pada pemikiran bahwa sebuah kota tidak lagi harus mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dengan hanya memanfaatkan potensi lokal-nya, tetapi harus juga mampu menarik partisipasi masyarakat, baik dari dalam maupun luar daerah, serta pelaku bisnis dan investor untuk ikut mendorong percepatan pembangunan daerahnya.
3. *Smart Economy*, dimaksudkan untuk mewujudkan ekosistem perekonomian di daerah yang mampu memenuhi tantangan di era informasi yang disruptif dan menuntut tingkat adaptasi yang cepat seperti saat ini. Oleh karena itu terdapat tiga

elemen dalam *Smart Economy*, yaitu ekosistem industri, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan ekosistem transaksi keuangan. Modal sosial seperti kepercayaan, gotong royong, toleransi, penghargaan, saling memberi dan saling menerima serta kolaborasi sosial memiliki pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi melalui berbagai mekanisme seperti meningkatnya rasa tanggung jawab terhadap kepentingan publik, meluasnya partisipasi dalam proses demokrasi, menguatnya keserasian masyarakat dan menurunnya tingkat kejahatan.

4. *Smart Living* menjadi salah satu dimensi dalam *Smart City* untuk menjamin kelayakan taraf hidup masyarakat di dalamnya. Kehidupan yang cerdas menjamin kelayakan taraf hidup masyarakat di dalam suatu kota. Kelayakan taraf hidup ini dapat dinilai dari tiga elemen, yaitu kelayakan pola hidup, kelayakan kualitas kesehatan, dan kelayakan moda transportasi untuk mendukung mobilitas orang dan barang.
5. *Smart Society*, merupakan dimensi yang banyak membahas tentang manusia sebagai unsur utama sebuah kota, dimana dimensi fisik dan virtual dari kehidupan warga kota semakin terjalin secara intensif dengan mediasi teknologi. Ada tiga elemen di dalam *Smart Society*, yaitu komunitas warga (*community*), ekosistem pembelajaran (*learning*), dan sistem keamanan (*security*).
6. *Smart Environment*, yang menunjukkan adanya perhatian bagi lingkungan hidup dalam pembangunan kota yang sama besarnya dengan perhatian yang diberikan terhadap pembangunan infrastruktur fisik maupun pembangunan bagi sarana dan prasarana bagi warga. Elemen utama pada dimensi ini adalah perlindungan air, udara dan tanah, pengelolaan energi, serta sampah. *Smart Environment* berarti lingkungan yang bisa memberikan kenyamanan, keberlanjutan sumber daya, keindahan fisik maupun non fisik, visual maupun tidak, bagi masyarakat dan publik. Menurut undang-undang tentang penataan ruang, mensyaratkan 30% lahan perkotaan harus difungsikan untuk ruang terbuka hijau baik privat maupun publik. Lingkungan yang bersih tertata merupakan contoh dari penerapan lingkungan yang pintar. Sasaran dari *Smart Environment* adalah mewujudkan tata kelola lingkungan yang baik, bertanggung-jawab, dan berkelanjutan

1.5. Keterhubungan *Rencana Induk Smart City* dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Penyusunan *Rencana Induk* (*Rencana Induk Smart City* Daerah ke dalam tiga bagian dimaksudkan untuk memperjelas posisi bagian analisis, bagian isi rencana induk, dan ringkasan rencana induk. Bagian analisis disajikan ke dalam Dokumen I sebagai pengantar menuju bagian isi rencana induk yang merupakan bagian inti rencana *Smart City* Daerah yang disajikan pada Dokumen II. Sedangkan Dokumen III adalah ringkasan eksekutif (*executive summary*) merupakan versi ringkas dari dokumen *Rencana Induk Smart City* Daerah yang diperuntukkan bagi kalangan tertentu, seperti Kepala Daerah dan kalangan eksekutif lainnya yang membutuhkan penjelasan esensial yang merupakan pokok-pokok utama dari masterplan tersebut. Buku *Quickwins* merupakan buku penjelasan dan profil dari masing-masing program *quickwins* daerah. Buku *Rencana Induk Kawasan* adalah buku *Rencana Induk* kawasan *Smart City* yang terdiri dari beberapa Kabupaten/Kota.

1.5.1. Keterhubungan *Rencana Induk Smart City* dengan RPJMD

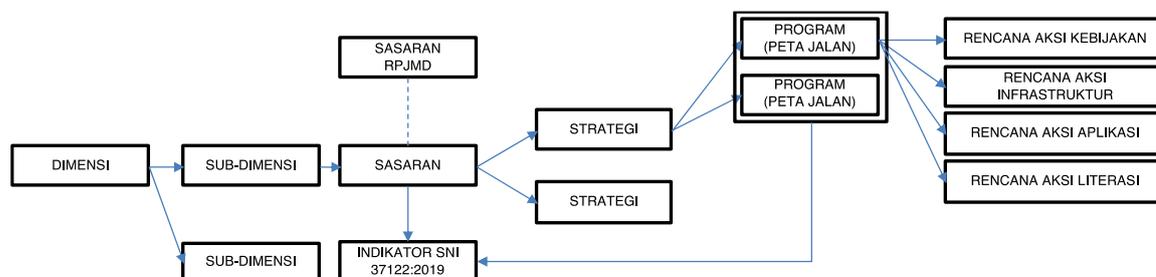
Dalam penyusunan *Rencana Induk Smart City*, tentu saja tidak bisa terlepas dari arah kebijakan dan rumusan perencanaan yang telah ada dan ditetapkan di dalam dokumen perencanaan pembangunan yang berlaku di daerah, khususnya RPJMD sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat arah kebijakan pembangunan kepala daerah yang sedang menjabat.

Keterkaitan antara dokumen perencanaan, khususnya RPJMD, dapat disusun dalam sebuah peta keterkaitan sebagaimana yang terlihat pada **Kesalahan! Sumber referensi tidak ditemukan.** Terlihat bahwa keterkaitan antara *Rencana Induk Smart City* dan RPJMD dapat terjadi pada tingkat sasaran, yaitu antara sasaran *Smart City* daerah dan sasaran RPJMD dalam masing-masing sub-dimensi *Smart City* dari 6 dimensi yang ada. Pemetaan ini telah dilakukan pada Buku 1, Analisis Strategi *Smart City* Daerah.

Sasaran *Smart City* daerah yang ditetapkan merupakan sasaran jangka panjang yang harus dicapai dalam waktu sepuluh tahun. Sasaran ini dibuat untuk setiap dimensi untuk kemudian dicapai melalui serangkaian strategi dan program *Smart City*, baik program pada peta jalan maupun ada rencana aksi *Smart City* daerah, yang dikembangkan pada buku ini.

Strategi dirumuskan untuk mencapai tiap Sasaran *Smart City*, dan setiap program pembangunan pada Peta Jalan dan Rencana Aksi dikaitkan ke tiap Strategi.

Sasaran dan Program Pembangunan direlasikan ke Indikator SNI ISO 37122:2019.

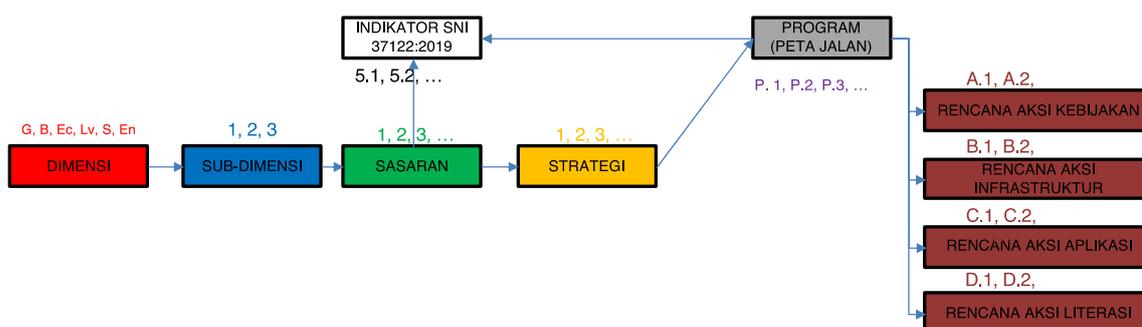


Gambar 1. 4 Kerangka Keterkaitan antara Sasaran *Smart City* dengan RPJMD

Sebuah sasaran *Smart City* daerah yang baik harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. *Specific*, yaitu definisi indikator kinerja *Smart City* harus jelas dan tidak bermakna ganda sehingga mudah untuk dimengerti dan digunakan.
2. *Measurable*, yaitu indikator yang digunakan dapat diukur dengan skala penilaian tertentu yang disepakati, dapat berupa pengukuran secara kuantitas, kualitas atau harga.
3. *Appropriate*, yaitu indikator yang dipilih harus sesuai dengan upaya peningkatan pelayanan/kinerja.
4. *Relevant*, yaitu indikator terkait secara logis dengan visi *Smart City* yang diinginkan serta tugas dan fungsi masing-masing institusi yang bertanggung jawab.
5. *Continuously improved*, yaitu terdapat peningkatan kinerja seiring dengan terlaksananya program-program *Smart City*.
6. *Cost-effective*, manfaat target capaian kinerja *Smart City* yang diinginkan sebanding atau dapat dicapai dengan biaya yang harus dialokasikan.

Di samping itu, untuk memudahkan dalam penyajian sasaran, strategi dan program-program *Smart City* di dalam master plan, maka dapat disusun kodifikasi pada pada masterplan *Smart City* dari mulai dimensi *Smart City* dan sub-dimensi *Smart City* sebagaimana relasi-nya dapat dilihat pada **Kesalahan! Sumber referensi tidak ditemukan.** di bawah ini.



Gambar 1.5 Kerangka Kodifikasi Program Smart City

Di dalam gambar di atas, sistem kodifikasi untuk dimensi *Smart City* adalah sebagai berikut:

- G untuk *Smart Governance*
- B untuk *Smart Branding*
- Ec untuk *Smart Economy*
- Lv untuk *Smart Living*
- S untuk *Smart Society*
- En untuk *Smart Environment*

Kemudian masing-masing sub-dimensi dari ke-6 dimensi *Smart City* di atas juga dapat dikodifikasi dengan angka 1, 2, dan 3 sesuai sub-dimensi terkait. Sedangkan untuk Sasaran dan Strategi pada masing-masing sub-dimensi, dapat diberikan kodifikasi berupa penomoran dari mulai 1 hingga sejumlah sasaran dan strategi yang dimiliki oleh setiap sub-dimensi.

Kemudian, untuk program pada peta jalan *Smart City*, kodifikasi dapat diberikan dengan menggunakan kode huruf P diikuti dengan angka urutan program tersebut pada peta jalan *Smart City*.

Demikian juga pada rencana aksi *Smart City*, kodifikasi dapat diberikan dengan menggunakan kodifikasi sebagai berikut:

- huruf A diikuti dengan penomoran angka urutan program untuk program-program rencana aksi pengembangan kebijakan dan kelembagaan,
- huruf B diikuti dengan penomoran angka urutan program untuk program-program rencana aksi pengembangan infrastruktur pendukung,
- huruf C diikuti dengan penomoran angka urutan program untuk program-program rencana aksi pengembangan aplikasi dan perangkat lunak,
- huruf D diikuti dengan penomoran angka urutan program untuk program-program rencana aksi penguatan literasi,

Sehingga, dengan rumusan kodifikasi seperti ini, maka dapat dicontohkan program dengan kode Kode Program G.1.2.3.P.4 adalah Program ke-4 untuk merealisasikan Strategi ke-3 dari Sasaran ke-2 pada Sub-Dimensi ke-1 (Pelayanan Publik) di *Smart Governance*; atau program dengan Kode Program G.1.2.3.P.4.A.1 adalah Rencana Aksi (Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan) untuk Program ke-4 untuk merealisasikan Strategi ke-3 dari Sasaran ke-2 pada Sub-Dimensi ke-1 (Pelayanan Publik) di *Smart Governance*.

1.5.2. Keterhubungan Rencana Induk Smart City dengan SNI ISO 37120:2019

Dalam mengukur pembangunan masyarakat berkelanjutan, terdapat indikator - indikator pengukuran yang tertuang di dalam standar ISO 37120 : 2018, ISO 37122: 2019 dan ISO 37123 : 2019.



Gambar 1. 6 Hubungan Antar Standar Indikator Perkotaan

Standar SNI ISO 37120:2018 difokuskan pada pelayanan perkotaan dan kualitas hidup sebagai kontribusi pada keberlangsungan kota yang terdiri dari beberapa indikator. Indikator-indikator ini dapat digunakan untuk melacak dan memantau kemajuan kinerja perkotaan. Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, seluruh sistem perkotaan perlu dipertimbangkan. Perencanaan untuk kebutuhan-kebutuhan masa depan harus mempertimbangkan penggunaan dan efisiensi sumber daya saat ini untuk bisa lebih baik merencanakan masa depan. Indikator-indikator dan metode-metode pengujian terkait dalam Standar Nasional ini telah dikembangkan untuk membantu perkotaan tersebut dalam:

- a) Mengukur manajemen kinerja layanan-layanan perkotaan dan kualitas hidup dari waktu ke waktu;
- b) Belajar dari satu sama lain dengan memungkinkan perbandingan di berbagai ukuran-ukuran kinerja; dan,
- c) Mendukung pengembangan kebijakan dan pengaturan prioritas.

Di dalam penyusunan Rencana Induk *Smart City*, indikator-indikator yang terdapat di dalam SNI ISO 37120:2018 dapat digunakan sebagai indikator pada sasaran pembangunan *Smart City* bersama dengan indikator-indikator yang terdapat di dalam dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD, renstra OPD, atau indikator-indikator tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

1.5.3. Keterhubungan Rencana Induk *Smart City* dengan SNI ISO 37122:2019

SNI ISO 37122 merupakan standar pertama dari standar SNI ISO 37120, “Pembangunan berkelanjutan masyarakat - Indikator untuk layanan perkotaan dan kualitas hidup. Standar ini menentukan dan menetapkan definisi dan metodologi untuk serangkaian indikator untuk *Smart City*. SNI ISO 37122:2019 digunakan untuk membantu kota mengidentifikasi

indikator yang berguna dalam penerapan sistem manajemen kota, penerapan kebijakan, program, dan proyek kota pintar, dengan maksud antara lain:

- Melakukan identifikasi kebutuhan dan manfaat infrastruktur cerdas;
- Menyediakan tatanan lingkungan hidup yang lebih baik di mana kebijakan, praktik, dan teknologi yang cerdas digunakan untuk melayani masyarakat;
- Mengantisipasi tantangan-tantangan seperti pertumbuhan populasi yang cepat, perubahan iklim, dan instabilitas politik dan ekonomi dengan cara melibatkan masyarakat sebagai aspek yang fundamental;
- Memanfaatkan teknologi modern yang didukung informasi dan data untuk meningkatkan layanan dan kualitas hidup yang lebih baik kepada masyarakat;
- Mengimplementasikan metode kepemimpinan kolaboratif, bekerja melalui perencanaan yang disiplin dan sistem terpadu;
- Mencapai tujuan lingkungan yang menerapkan keberlanjutan dengan cara yang lebih inovatif;
- Memfasilitasi inovasi dan pertumbuhan;
- Membangun ekonomi yang dinamis dan inovatif yang siap menghadapi tantangan masa depan.

Di dalam penyusunan Rencana Induk *Smart City*, indikator-indikator yang terdapat di dalam SNI ISO 37122:2019 dapat digunakan sebagai indikator pada sasaran pembangunan *Smart City* bersama dengan indikator-indikator yang terdapat di dalam dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD, renstra OPD, atau indikator-indikator tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

1.5.4. Keterkaitan Rencana Induk *Smart City* dengan Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan; Pembangunan dan Keuangan Daerah yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 ditujukan untuk menyediakan informasi secara berjenjang melalui penggolongan,

pemberian kode, dan daftar penamaan yang akan digunakan Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah.

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur disusun secara sistematis meliputi:

- a. urusan, bidang urusan, program, kegiatan, dan sub kegiatan;
- b. fungsi;
- c. organisasi;
- d. sumber pendanaan;
- e. wilayah administrasi pemerintahan; dan
- f. rekening.

Kodifikasi Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Klasifikasi perencanaan pembangunan daerah terdiri atas:
 - a) program penunjang urusan Pemerintahan Daerah;
 - b) urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
 - c) urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar;
 - d) urusan pilihan;
 - e) unsur pendukung urusan pemerintahan;
 - f) unsur penunjang urusan pemerintahan;
 - g) unsur pengawasan urusan pemerintahan;
 - h) unsur kewilayahan;
 - i) unsur pemerintahan umum; dan
 - j) unsur kekhususan dan keistimewaan.
- 2) Kodefikasi berdasarkan klasifikasi urusan pemerintahan yang digunakan provinsi/kabupaten/kota terdiri atas:
 - a) program penunjang urusan pemerintahan daerah dengan kode “XX”;
 - b) urusan pemerintahan konkuren terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu:
 - i. urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar diberikan kode angka 1 (satu);
 - ii. urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar terkait pelayanan dasar diberikan kode angka 2 (dua); dan

- iii. urusan Pilihan diberikan kode angka 3 (tiga).
 - a) unsur pendukung urusan pemerintahan diberikan kode angka 4 (empat);
 - b) unsur penunjang urusan pemerintahan diberikan kode angka 5 (lima);
 - c) unsur pengawasan urusan pemerintahan diberikan kode angka 6 (enam);
 - d) unsur kewilayahan diberikan kode angka 7 (tujuh);
 - e) unsur pemerintahan umum diberikan kode angka 8 (delapan); dan
 - f) unsur kekhususan dan keistimewaan diberikan kode angka 9 (sembilan).
- 3) Klasifikasi dan kodifikasi urusan pemerintahan konkuren terbagi menjadi 32 (tiga puluh dua) bidang urusan yang terdiri atas:
- a) urusan pemerintahan bidang pendidikan dengan kode 1.01;
 - b) urusan pemerintahan bidang kesehatan dengan kode 1.02;
 - c) urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dengan kode 1.03;
 - d) urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dengan kode 1.04;
 - e) urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dengan kode 1.05;
 - f) urusan pemerintahan bidang sosial dengan kode 1.06;
 - g) urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dengan kode 2.07;
 - h) urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan kode 2.08;
 - i) urusan pemerintahan bidang pangan dengan kode 2.09;
 - j) urusan pemerintahan bidang pertanahan dengan kode 2.10;
 - k) urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dengan kode 2.11;
 - l) urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan kode 2.12;
 - m) urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dengan kode 2.13;
 - n) urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dengan kode 2.14;
 - o) urusan pemerintahan bidang perhubungan dengan kode 2.15;
 - p) urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dengan kode 2.16;

- q) urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dengan kode 2.17;
 - r) urusan pemerintahan bidang penanaman modal dengan kode 2.18;
 - s) urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga dengan kode 2.19;
 - t) urusan pemerintahan bidang statistik dengan kode 2.20;
 - u) urusan pemerintahan bidang persandian dengan kode 2.21;
 - v) urusan pemerintahan bidang kebudayaan dengan kode 2.22;
 - w) urusan pemerintahan bidang perpustakaan dengan kode 2.23;
 - x) urusan pemerintahan bidang kearsipan dengan kode 2.24;
 - y) urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan dengan kode 3.25;
 - z) urusan pemerintahan bidang pariwisata dengan kode 3.26;
 - ā) urusan pemerintahan bidang pertanian dengan kode 3.27;
 - ä) urusan pemerintahan bidang kehutanan dengan kode 3.28;
 - ö) urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral dengan kode 3.29;
 - aa) urusan pemerintahan bidang perdagangan dengan kode 3.30;
 - bb) urusan pemerintahan bidang perindustrian dengan kode 3.31; dan
 - cc) urusan pemerintahan bidang transmigrasi dengan kode 3.32.
- 4) Klasifikasi dan kodefikasi unsur pendukung urusan pemerintahan terdiri atas:
- a) unsur Sekretariat daerah dengan kode 4.01; dan
 - b) unsur Sekretariat DPRD dengan kode 4.02.
- 5) Klasifikasi dan kodefikasi unsur penunjang urusan pemerintahan terdiri atas:
- a) unsur perencanaan dengan kode 5.01;
 - b) unsur keuangan dengan kode 5.02;
 - c) unsur kepegawaian dengan kode 5.03;
 - d) unsur pendidikan dan pelatihan dengan kode 5.04;
 - e) unsur penelitian dan pengembangan dengan kode 5.05;
 - f) unsur pengelolaan perbatasan daerah dengan kode 5.06; dan
 - g) unsur penghubung dengan kode 5.07.
- 6) Klasifikasi dan kodefikasi Unsur pengawasan urusan pemerintahan yaitu inspektorat daerah dengan kode 6.01.
- 7) Klasifikasi dan kodefikasi unsur kewilayahan yang terbagi menjadi:
- a) provinsi yang terdiri atas:
 - (1) kecamatan dengan kode 7.01;

- (2) kota administrasi di Provinsi DKI Jakarta dengan kode 7.02; dan
- (3) kabupaten administrasi di Provinsi DKI Jakarta dengan kode 7.03.

b) kabupaten/kota yaitu kecamatan dengan kode 7.01.

- 8) Klasifikasi dan kodifikasi urusan pemerintahan umum yaitu kesatuan bangsa dan politik dengan kode 8.01.
- 9) Klasifikasi dan kodifikasi unsur kekhususan yaitu Keistimewaan Aceh dengan kode 9.01.
- 10) Urusan pemerintahan, sub urusan pemerintahan, dan kewenangan antar susunan unsur pemerintahan perlu diterjemahkan kedalam bentuk konkrit berupa nomenklatur program dan kegiatan daerah. Penterjemahan urusan pemerintahan menjadi nomenklatur program dan kegiatan untuk memastikan bahwa daerah menyelenggarakan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangannya.
- 11) Klasifikasi dan kodifikasi program disusun berdasarkan pembagian sub urusan dan kegiatan disusun berdasarkan pembagian kewenangan yang diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Hal ini dilakukan untuk memastikan ruang lingkup penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan sesuai dengan kewenangannya, sehingga mendukung pelaksanaan asas prinsip akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas serta kepentingan strategis nasional.
- 12) Klasifikasi dan kodifikasi sub kegiatan disusun berdasarkan aktivitas atau layanan dalam penyelesaian permasalahan daerah sesuai kewenangannya. Selanjutnya, kodifikasi program, kegiatan dan sub kegiatan terdiri atas:
 - a) program penunjang urusan Pemerintah Daerah dengan kode x|xx|01; dan
 - b) program dalam rangka melaksanakan urusan sesuai dengan bidang urusannya dengan kode x|xx|02.

Kodifikasi kegiatan dan sub kegiatan pada setiap program dikodifikasi dimulai dari angka x|xx|xx|2.01, x|xx|xx|2.02 sampai dengan jumlah kegiatan di setiap program;

Sub kegiatan pada setiap kegiatan dikodifikasi dimulai dari angka x|xx|xx|x.xx|01 sampai dengan jumlah sub kegiatan di setiap kegiatan.

1.5.5. Keterhubungan Rencana Induk Smart City dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Revolusi teknologi informasi dan komunikasi memberikan peluang untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau *e-government*, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya.

SPBE memungkinkan percepatan dan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, serta meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat.

Tantangan penerapan SPBE pemerintah terutama di daerah adalah melakukan integrasi layanan perencanaan, layanan penganggaran, layanan pengadaan, dan layanan manajemen kinerja yang berbasis elektronik, baik integrasi internal daerah maupun integrasi antar daerah secara nasional. Demikian juga pelayanan publik, menjadi tantangan bersama bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dalam implementasi *Smart City*, penerapan SPBE khususnya berkaitan erat dengan dimensi *Smart Governance*. Ini sesuai dengan visi SPBE adalah "Terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi".

Visi tersebut selaras dengan sasaran *Smart Governance* dalam menghasilkan birokrasi pemerintah yang integratif, dinamis, transparan, dan inovatif, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, dan adaptif.

2. **VISI SMART CITY KOTA BOGOR**

Pada bagian ini akan dijelaskan dan diuraikan visi dan misi *Smart City* Kota Bogor sebagai landasan perumusan rumusan sasaran target capaian pembangunan *Smart City*. Visi dan Misi *Smart City* dibuat dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu:

1. Visi dan Misi Pembangunan Nasional
2. Visi dan Misi Pembangunan Daerah yang tercantum di dalam dokumen RJPMD
3. Harapan warga masyarakat
4. Analisis faktor eksternal di masa depan.
- 5.

Visi Pembangunan Nasional Indonesia 2005 s.d 2025 adalah:

” Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur ”³,

tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (RPJP Nasional).

RPJPD Propinsi Jawa Barat 2005-2025 (Perda Propinsi Jawa Barat Nomor 24 tahun 2010)

Visi : **”Dengan Iman dan Takwa, Propinsi Jawa Barat Termaju di Indonesia”**

Misi :

1. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang berbudaya ilmu dan teknologi, produktif dan berdaya saing
2. Meningkatkan perekonomian yang berdaya saing dan berbasis potensi daerah,
3. Mewujudkan lingkungan hidup yang asri dan lestari
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan

³ <https://www.bpkp.go.id/berita/read/2208/13290/Sosialisasi-Rencana-Pembangunan-Jangka-Panjang-Nasional>

Berdasarkan RPJPD Kota Bogor 2005-2025 (Perda Kota Bogor Nomor 7 tahun 2009)

Visi : “Kota Jasa yang Nyaman dengan Masyarakat Madani dan Pemerintahan Amanah”

Visi tersebut mengandung makna:

1. Kota Jasa mengandung pengertian bahwa Kota Bogor menjadi pusat jasa dalam pengertian pelayanan (*services*) dan sektor ekonomi tersier (*economic activities*). Kota Bogor akan diarahkan untuk menjadi suatu kota yang aktivitas masyarakatnya bergerak terutama di sektor jasa. Sektor jasa merupakan sektor yang mendukung bagi berkembangnya aktivitas-aktivitas yang ada di masyarakat baik aktivitas budaya, ekonomi, penataan fisik kota, maupun penanganan masalah kota. Sektor ini perlu diprioritaskan untuk mendorong perekonomian Kota Bogor, terutama pada sub sektor jasa perdagangan, hotel dan restoran, jasa angkutan dan komunikasi, jasa keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, jasa pendidikan serta jasa-jasa lainnya
2. Nyaman berarti bahwa Kota Bogor diharapkan menjadi kota yang bersih, indah, tertib dan aman serta berwawasan lingkungan
3. Masyarakat madani berarti bahwa masyarakat Kota Bogor harus memiliki derajat kualitas kehidupan yang tinggi baik dari segi keimanan, pendidikan, keterampilan, kesehatan, dan daya beli masyarakat yang tercermin dari tingginya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terutama dari Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Melek Huruf (AMH), dan daya beli masyarakat (*Purchasing Power Parity*).
4. Pemerintahan amanah yaitu pemerintahan yang baik yang senantiasa mengacu kepada kepentingan masyarakat. Hal ini ditandai dengan terwujudnya pelayanan publik yang prima di segala bidang serta terbukanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kota Bogor.

Misi:

1. Mengembangkan perekonomian masyarakat dengan titik berat pada jasa yang mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada
2. Mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman (beriman) dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan
3. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang beriman, berketerampilan, sehat, cerdas dan sejahtera

4. Mewujudkan pemerintahan kota yang efektif dan efisien serta menjunjung tinggi supremasi hukum

Sebagaimana tercantum dalam Perubahan RJPMD 2019 - 2024, (RPJPD 2005-2025) Visi pembangunan jangka menengah daerah Kota Bogor, yang ingin dicapai adalah:

“Terwujudnya Kota Bogor sebagai Kota Yang Ramah Keluarga”

Kota Bogor, meliputi seluruh wilayah dan isinya, dalam arti Kota Bogor dan seluruh warganya yang berada di dalam kawasan dalam batas-batas tertentu yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Kota Bogor.

Kota Yang Ramah Keluarga dapat diartikan sebagai berikut:

1. Kondisi Ramah Keluarga dipenuhi dari derajat kualitas masyarakat dan lingkungannya yang memadai, yang tercermin dari kondisi kesehatan, pendidikan, sosial masyarakat serta kondisi infrastruktur lingkungan yang baik dalam mendukung aktivitas masyarakat menuju taraf kehidupan yang lebih baik.
2. Kondisi Ramah Keluarga juga harus dipenuhi dari kondisi sektor ekonomi yang kondusif bagi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya.
3. Kondisi Ramah Keluarga dipenuhi dari pencapaian keluarga yang berkualitas oleh masyarakat serta menumbuhkembangkan nilai-nilai keluarga dalam hubungan bermasyarakat serta tata kelola pemerintahan yang berkompeten.

Tiga Misi yang ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Kota Bogor 2019- 2024 adalah:

1. Mewujudkan Kota Bogor Yang Sehat
2. Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas
3. Mewujudkan Kota Bogor Yang Sejahtera

Berbagai permasalahan daerah baik dari sisi pelayanan publik, ketersediaan data penunjang perancangan kebijakan, daya saing bisnis dan pariwisata, kesejahteraan dan ekonomi, bisnis, kesehatan, transportasi, pendidikan, keamanan, lingkungan hidup dan energi dapat disolusikan secara bertahap dengan implementasi Rencana Induk dan Peta

Jalan *Smart City* yang dapat memaksimalkan potensi daerah dengan pemanfaatan teknologi yang tepat guna.

Sehingga Visi *Smart City* kota Bogor 2023 -2027 adalah:

“Terwujudnya Kota Bogor sebagai Kota warisan budaya yang cerdas dan sejahtera pada tahun 2027”

Visi tersebut memiliki 3 kata kunci yaitu Warisan budaya, Cerdas dan Sejahtera, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Warisan budaya** dimaksudkan kota Bogor yang memiliki kekuatan warisan budaya dari para leluhur. Bogor berkaitan dengan berdirinya kerajaan-kerajaan yang memerintah di wilayah tersebut, salah satunya adalah Kerajaan Padjajaran yang rajanya terkenal dengan suatu ajaran dari leluhur yang dijunjung tinggi yang mengejar kesejahteraan, selain kerajaan banyak juga pusaka-pusaka berharga dan karunia keindahan alam di kota Bogor yang menjadikan Bogor sebagai *cultur heritage city*. *Heritage* atau warisan budaya selalu akan terkait dengan tertariknya turis (lokal dan luar), penciptaan pekerjaan baru, warisan budaya akan terkait dengan proses perlindungan terhadap lingkungan dan peninggalan budaya yang perlu dilestarikan, dan warisan budaya akan meningkatkan rasa cinta dan memiliki masyarakat terhadap kota Bogor.
2. **Cerdas** dimaksudkan bahwa Kota Bogor akan menjadi kota warisan budaya yang menerapkan kecerdasan (berbasis digital) dalam pembangunan daerahnya yang bertujuan untuk mencapai masyarakat sejahtera sesuai dengan Visi Nasional dan Visi RPJMD 2019-2024.
3. **Sejahtera** dimaksudkan bahwa Kota Bogor akan menjadi kota warisan budaya yang dapat mensejahterakan masyarakatnya sesuai dengan Visi Nasional dan Visi RPJMD 2019-2024

3. STRATEGI PEMBANGUNAN *SMART CITY* KOTA BOGOR

Strategi merupakan alat untuk mencapai visi dan misi yang sudah ditetapkan oleh perusahaan, serta untuk mencapai sasaran atau tujuan, baik tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang.

Menurut Fred R. David, strategi adalah sarana yang bersama dengan tujuan jangka panjang yang hendak dicapai, akan mempengaruhi kemakmuran jangka panjang organisasi, biasanya setidaknya selama lima tahun, dan dengan demikian berorientasi pada masa depan. Strategi memiliki konsekuensi multifungsi atau multidivisi dan memerlukan pertimbangan faktor eksternal dan internal yang dihadapi organisasi.

Dalam *Rencana Induk Smart City* ini, strategi diformulasikan untuk tiap-tiap dimensi dan sub dimensi *Smart City*. Tahap ini biasa disebut dengan *strategy formulation*. Setiap strategi akan diimplementasikan dalam bentuk program atau kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya dalam waktu lima tahun ke depan. Untuk setiap strategi perlu ditetapkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan implementasi strategi tersebut, atau yang dikenal dengan istilah evaluasi strategi atau *strategy evaluation*. Indikator kinerja ini melengkapi indikator utama yang dibuat dengan mengacu pada ISO 37122:2019.

3.1. *Smart Governance*

Inisiatif pembangunan *Smart Governance* di antaranya dapat dilakukan pada beberapa indikator sebagai berikut:

a. **Pelayanan Publik (*Public Service*)**

- Pelayanan administrasi kepada masyarakat seperti status kewarganegaraan, status usaha, sertifikat kompetensi, kepemilikan, atau penguasaan atas barang untuk menghasilkan dokumen - dokumen resmi seperti SIUP, ijin trayek, ijin usaha, akta, kartu tanda penduduk, sertifikat tanah, dan lain sebagainya.

- Peningkatan penyediaan sarana prasarana dan monitoring penyediaan kebutuhan bahan pokok masyarakat seperti sembilan bahan pokok, air bersih, dan lain-lain.
- Peningkatan penyediaan sarana prasarana dan monitoring penyediaan kebutuhan jasa pokok masyarakat misalnya jaringan telepon, listrik, internet, dan lain-lain.

b. Manajemen Birokrasi Yang Efsien (*Bureaucracy*)

Tata kelola birokrasi yang berorientasi pada keadilan (*fairness*), bertanggung-jawab (*accountability*) dan keterbukaan (*transparency*).

Misalnya: sistem *e-planning*, *e-budgeting*, *e-monev* dan lain-lain. Pengembangan aplikasi e-gov harus diarahkan menuju *integrated & inter-operability e-gov* atau yang saling berkomunikasi dan terhubung antar satu aplikasi dengan aplikasi lainnya serta lintas OPD atau yang disebut dengan *Smart e-Gov*. Pelayanan *Smart e-Gov* ini perlu didukung dengan sebuah “*City Operation Center (COC)*”.

c. Efisiensi Kebijakan Publik (*Public Policy*)

- Pengambilan kebijakan publik dengan mengutamakan pada aspek yang memberikan dampak positif bagi masyarakat melalui mekanisme mendengarkan aspirasi masyarakat secara berkesinambungan.
- Sistem informasi kebijakan pemerintah (Perda dan Peraturan Kepala Daerah) yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah.

Dengan merujuk pada indikator di atas, maka strategi dimensi *Smart Governance* di Kota Bogor berikut indikator kinerja dan indikator SNI 37122:2019 adalah sebagaimana tercantum pada Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3. 1 Strategi Dimensi Smart Governance

Sub-Dimensi	Sasaran	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja
G.1. Layanan Publik	G.1.1 Peningkatan layanan publik (Pelayanan Terpadu Satu Pintu berbasis Teknologi Informasi (TI) dan Online)	G.1.1.1 Pengembangan layanan publik terintegrasi yang didukung TIK	G.1.1.1.P.1 Pengembangan sistem pelayanan satu pintu terintegrasi antar OPD: Kependudukan, IMB, NIB dll.	Percepatan pelayanan publik (persentase implementasi sistem pelayanan satu pintu terintegrasi)
			G.1.1.1.P.2 Implementasi layanan kependudukan di tingkat kecamatan	Persentase perluasan layanan publik terdigitalisasi (persentase jumlah kecamatan yang terimplementasi)
			G.1.1.1.P.3 Aplikasi Pembayaran Pajak dan Retribusi untuk diimplementasikan di tingkat kecamatan	Peningkatan pendapatan pajak dan retribusi di tingkat kecamatan (persentase jumlah kecamatan yang terimplementasi)
	G.1.2 Peningkatan dan pengembangan sarana penyampaian partisipasi masyarakat berbasis IT dan online (keterlibatan masyarakat)	G.1.2.1 Membangun platform penampung aspirasi masyarakat	G.1.2.1.P.1 Penambahan fungsi dan fitur penyampaian aspirasi dan komentar di setiap situs web OPD	Tersampainya pengaduan masyarakat ke tiap OPD (tersedianya fungsi pengaduan pada seluruh website OPD)
			G.1.2.1.P.2 Pembangunan pengaduan online (pengaduan, saran, kritik): Aplikasi mobile, SMS, Whatsapp, dll.	Terbentuknya database aspirasi masyarakat (kemajuan pembangunan aplikasi)

Sub-Dimensi	Sasaran	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja
	G.1.3 Pemanfaatan crowdfunding dan creative funding sebagai sumber pendanaan pembangunan aplikasi dan layanan public.	G.1.3.1 Pengembangan inovasi berbasis Publik yang memberikan dampak positif kepada pemerintahan	G.1.3.1.P.1 Pembangunan aplikasi berbasis komunitas untuk mempermudah masyarakat mengakses semua layanan publik	Terbentuknya aplikasi untuk akses layanan public dalam 1 aplikasi mobile
			G.1.3.1.P.2 Penyediaan sarana akses data dan informasi yang dapat digunakan untuk mengembangkan aplikasi oleh masyarakat	Penyediaan Data Terbuka yang dapat diakses publik
	G.1.4 Peningkatan skill dan kompetensi SDM Pemerintah daerah di bidang TIK	G.1.4.1 Peningkatan kompetensi TIK bagi ASN	G.1.4.1.P.1 Pelatihan dasar untuk penyeragaman standarisasi literasi TIK (matrikulasi)	Persentase OPD yang menerapkan SPBE
			G.1.4.1.P.2 Pelatihan kompetensi analis proses bisnis untuk tiap OPD (untuk menyusun proses bisnis demi peningkatan kinerja dengan dukungan TIK)	Persentase OPD yang menerapkan efektivitas dan efisiensi proses bisnis/proses kerja
			G.1.4.1.P.3 Perekrutan ASN berlatar belakang TIK secara bertahap	Peningkatan literasi TIK (persentase ASN yang mengikuti program)

Sub-Dimensi	Sasaran	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja
		G.1.4.2 Peningkatan kedisiplinan ASN G.1.4.3	G.1.4.2.P.1 Implementasi Sistem Presensi (kehadiran) Elektronik dan penerapan tunjangan kinerja	Tersedianya analis bisnis untuk tiap OPD untuk penyusunan proses bisnis berbasis TIK (persentase OPD yang memiliki analis bisnis)
G.2. Birokrasi	G.2.1 Peningkatan digitalisasi administrasi di setiap Dinas	G.2.1.1 Mengimplementasikan aplikasi umum di seluruh OPD secara bertahap	G.2.1.1.P.1 Pembangunan dan/atau implementasi aplikasi umum pemerintahan: <ul style="list-style-type: none"> • Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan • Sistem perencanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan. • JDIH • Persuratan elektronik (Surat Masuk, Surat Keluar, Nota Dinas, dll.) • Tata Naskah (SK, SE, dll.). 	Persentase OPD yang menerapkan SPBE
		G.2.1.2 Melakukan analisis proses bisnis untuk membangun aplikasi khusus di setiap OPD secara bertahap	G.2.1.2.P.1 Analisis proses bisnis di tiap OPD untuk efisiensi dan efektivitas layanan birokrasi	Persentase OPD yang menerapkan efektivitas dan efisiensi proses bisnis/proses kerja

Sub-Dimensi	Sasaran	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja
	G.2.2 Integrasi data untuk mendukung manajemen informasi di lingkungan kerjaya daerah kota Bogor	G.2.2.1 Standarisasi pembangunan aplikasi penghubung layanan yang mendukung integrasi data antar aplikasi	G.2.2.1.P.1 Mengatur penerapan system penghubung layanan IPPD sesuai dengan Perpres No. 95 tahun 2018	Tersedianya kebijakan dan tatakelola pembangunan aplikasi dan layanan penghubung yang terintegrasi dan saling terhubung
			G.2.2.1.P.2 Mengintegrasikan Database aplikasi yang telah ada dalam system satu data	Tersedianya database sebagai acuan implementasi satu data
			G.2.2.1.P.3 Menyediakan API management sebagai penghubung layanan antar aplikasi sehingga seluruh data terintegrasi	Tersedianya API sebagai acuan pembangunan aplikasi dan integrase data
		G.2.2.2 Penggunaan aplikasi berbagi pakai secara optimal	G.2.2.2.P.1 Pemanfaatan aplikasi berbagi pakai yang disediakan oleh keentorian terkait secara optimal	Tersedianya aplikasi berbagi pakai yang dimanfaatkan secara optimal
G.2.3	Penetapan kebijakan tentang pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) dan Teknologi Komunikasi Informasi (TIK) di lingkungan daerah kota Bogor	G.2.3.1 Menetapkan Kebijakan-kebijakan terkait kebijakan terkait sesuai ketentuan SPBE yang tercantum dalam Permen PANRB nomor 59 tahun 2020	G.2.3.1.P.2 Menetapkan kebijakan-kebijakan terkait Teknologi Informasi dan Teknologi Komunikasi Informasi sejalan dengan Permen PANRB	Telah diimplementasikannya semua kebijakan terkait TI dan TIK sesuai dengan acuan yang di tetapkan Permen PANRB

Sub-Dimensi	Sasaran	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja
G.3. Perancangan Kebijakan Publik	G.3.1 Pengembangan portal aplikasi dan perencanaan, penyajian dashboard dan evaluasi untuk pengambilan kebijakan strategis kota Bogor.	G.3.1.1 Aplikasi perencanaan pembangunan	G.3.1.1.P.1 Musrenbang online	Persentase terimplementasinya Musrenbang online di tiap kecamatan
		G.3.1.2 Pembangunan dashboard pendukung pengambilan kebijakan	G.3.1.2.P.1 Pembangunan dashboard untuk evaluasi dan pendukung pengambilan kebijakan	Kemajuan terbangunnya dashboard lengkap untuk pengambilan kebijakan pimpinan
	G.3.2 Menyusun SOP penanganan kebutuhan daerah yang tidak tercover oleh kebijakan pusat.	G.3.2.1 Pembuatan SOP dan tatakelola untuk kebijakan public yang memberikan kepastian dan kejelasan bagi masyarakat	G.3.2.1.P.1 Pemanfaatan media elektronik dan aplikasi untuk memudahkan public mengakses SOP dan Tatakelola terkait kebijakan-kebijakan public	Kebijakan Publik berupa SOP dan tatakelola dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat

3.2. *Smart Branding*

Inisiatif pembangunan *Smart Branding* di antaranya dapat dilakukan pada beberapa indikator sebagai berikut:

a. **Membangun dan Memasarkan Ekosistem Pariwisata (*Tourism Branding*)**

- Membangun dan mengembangkan destinasi wisata yang layak bagi wisatawan (destination).
- Membangun infrastruktur yang mendukung kenyamanan wisatawan (amenities) misalnya jalan, transportasi, hotel/motel/bedding & breakfast (B&B), restoran, dan lain-lain.
- Membangun budaya yang ramah kepada pengunjung (hospitality) termasuk kemampuan berbahasa asing, ketersediaan tour-guide dan lain-lain.

b. **Membangun platform dan Memasarkan Ekosistem Bisnis Daerah (*Business Branding*)**

- Membangun platform dan memasarkan ekosistem perdagangan yang kondusif dan nyaman, misalnya market place daerah.
- Membangun dan memasarkan ekosistem investasi yang mudah dan efektif, misalnya Investment Lounge, Dashboard, dan Portal Investasi Daerah.
- Membangun dan memasarkan produk dan jasa industri kreatif daerah misalnya kuliner, kriya, fashion, digital, dan lain-lain

c. **Membangun dan Memasarkan Wajah Kota (*City Appearance Branding*)**

- Mewujudkan penataan kembali wajah kota yang menonjolkan nilai arsitektur yang mencerminkan nilai-nilai daerah dan mengikuti dinamika modernisasi yang menginginkan sebuah tata ruang dan tata wilayah kota yang indah, bersih, rapi, dan membanggakan dengan kualitas arsitektur berkelas internasional.
- Membangun batas wilayah (*edge*), membangun penanda sebuah lokasi yang penting, berkesan bagi pengunjung (*landmark*), menyediakan navigasi yang unik menuju kota (*signage*), struktur jalan yang teratur (*path*), dan titik simpul kota (*node*) seperti alun-alun, simpang dan lain-lain

Dengan merujuk pada indikator di atas, maka strategi dimensi *Smart Branding* di Kota Bogor berikut indikator kinerja dan indikator SNI 37122:2019 adalah sebagaimana tercantum pada Tabel 3.2 berikut.

Tabel 3. 2 Strategi Dimensi *Smart Branding*

Sub-Dimensi	Sasaran	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja
B.1. PARI-WISATA	B.1.1 Melaksanakan event-event budaya berskala nasional dan internasional secara teratur	B.1.1.1 Meningkatkan event- event budaya berskala nasional dan internasional secara teratur	B.1.1.1.P.1 Pembuatan program dan event berskala nasional dan internasional B.1.1.1.P.2 Secara teratur (bekerja sama dengan kota/kabupaten sekitar)	<ul style="list-style-type: none"> • Akumulasi jumlah event wisata nasional/ internasional dan kerjasama dalam kawasan
	B.1.2 Peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM pariwisata melalui pelatihan atau workshop.	B.1.2.1 Meningkatkan kualitas layanan wisata di Kota Bogor	B.1.2.2.P.1 Peningkatan kuantitas dan kapabilitas SDM bidang pariwisata melalui pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> • Akumulasi jumlah penyelenggaraan pelatihan SDM bidang pariwisata per tahun • Persentase SDM pariwisata yang disertifikasi
	B.1.3 Melakukan pemeliharaan terhadap cagar budaya (benda dan tak benda)	B.1.3.1 Meningkatkan nilai Kawasan Pusaka dan bangunan cagar budaya	B.1.3.1.P.1 Mengidentifikasi dan legalisasi Kawasan Pusaka dan bangunan cagar budaya	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah penetapan Kawasan Pusaka dan bangunan cagar budaya

Sub-Dimensi	Sasaran	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja
			B.1.3.1.P.2 Menyusun panduan arsitektur dan rancang kota serta kajian pemanfaatan ruang dan kegiatan di Kawasan Pusaka dan bangunan cagar budaya	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah panduan arsitektur dan rancang kota serta kajian pemanfaatan ruang dan kegiatan di Kawasan Pusaka dan bangunan cagar budaya
			B.1.3.1.P.3 Melakukan upaya pemeliharaan dan restorasi bangunan cagar budaya dan kawasan Pusaka	<ul style="list-style-type: none"> Prosentase jumlah bangunan cagar budaya dan kawasan Pusaka yang direstorasi
			B.1.3.1.P.4 Sosialisasi aturan dan Peningkatan peran masyarakat dalam pemeliharaan cagar budaya	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah kegiatan sosialisasi aturan dan Peningkatan peran masyarakat dalam pemeliharaan cagar budaya
	B.1.3.2 Mengembangkan potensi sosial budaya masyarakat yang memiliki nilai sejarah		B.1.3.2.P.1 Identifikasi potensi sosial budaya masyarakat yang memiliki nilai sejarah	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah potensi sosial budaya masyarakat yang memiliki nilai sejarah
			B.1.3.2.P.2 Mengadakan event – event sosial budaya masyarakat yang memiliki nilai sejarah	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah event – event sosial budaya masyarakat yang memiliki nilai sejarah

Sub-Dimensi	Sasaran	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja
	B.1.4 Mengoptimalkan potensi cagar budaya dengan pemanfaatan teknologi digital dan Internet.	B.1.4.1 Promosi destinasi wisata secara daring	B.1.4.1.P.1 Pembuatan situs web resmi pariwisata Kota Bogor yang bertautan dengan berbagai platform travel dan wisata, termasuk juga akun resmi pada sosial media berbasis grafis (Facebook, instagram, twitter)	<ul style="list-style-type: none"> • Terbangunnya situs resmi pariwisata Kota Bogor yang terintegrasi (Persentase kemajuan) • Dibuatnya akun resmi pariwisata Kota Bogor pada media sosial yang teritegrasi • Terjalinnya kerjasama promosi pariwisata dengan media online (jumlah kerjasama) • Persentase kemajuan penataan destinasi wisata secara bertahap.
			B.1.4.1.P.2 Menjalin kerjasama dengan media dan influencer untuk memasarkan destinasi wisata Kota Bogor	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah kunjungan wisatawan
			B.1.4.1.P.3 Penataan kawasan wisata bertahap	
B.2. DAYA SAING BISNIS	B.2.1 Mendorong pengelolaan pola ruang kota berbasis potensi budaya lokal dan komersial dengan pemanfaatan Internet	B.2.1.1 Penetapan produk khas sebagai ikon daerah	B.2.1.1.P.1 Pendaftaran indikasi geografis dari suatu produk khas atau obyek khas daerah setempat ke Ditjen HaKI,	Akumulasi jumlah item produk indikasi geografis Kota Bogor

Sub-Dimensi	Sasaran	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja
	B.2.2 Pengembangan industri kreatif dan UMKM pengolahan hasil bumi dan kreativitas masyarakat kota Bogor (Pelatihan, dukungan promosi dan pemasaran online)	B.2.2.1 Pendampingan industri kreatif termasuk UMKM	B.2.2.1.P.1 Inkubasi industri kreatif dari pemerintah: pelatihan pengolahan, peningkatan mutu dan penambahan nilai produk	Akumulasi jumlah program inkubasi & pendampingan industri kreatif per tahun
			B.2.2.1.P.2 Permodalan industri kreatif	Akumulasi jumlah industri kreatif yang mendapat program permodalan per tahun
			B.2.2.1.P.3 Promosi dan pemasaran lewat tautan dengan situs web Pemkot Bogor, Prov. Jawa Barat dan Kementerian Pariwisata	Akumulasi jumlah konten promosi industri kreatif & UMKM di situs web Pemkot Bogor, Prov. Jawa Barat dan Kementerian Pariwisata
B.3. WAJAH (TAMPILAN) KOTA	B.3.1 Menata kembali wajah kota yang menonjolkan nilai arsitektur yang mencerminkan nilai-nilai kota Bogor selaras dengan dinamika modernisasi.	B.3.1.1 Membangun wajah kota yang lebih modern dan berwawasan <i>Smart City</i>	B.3.1.1.P.1 Pembuatan item-item pendukung kota cerdas (rambu lalu lintas dan penunjuk jalan, penerangan, patok pengaman jalan, titik simpul kota/alun-alun, taman kota)	Terbangunnya taman kota, Digital Signage, penerangan dll (Persentase kecamatan yang telah dilengkapi rambu, penerangan, marka)
			B.3.1.1.P.2 Pembuatan landmark kota	Terbangunnya Landmark Kota (Akumulasi jumlah landmark/ identitas khas kota)

Sub-Dimensi	Sasaran	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja
		B.3.1.2 Memberdayakan masyarakat untuk menata kampung dan pemukiman untuk mempercantik kota	B.3.1.2.P.1 Lomba antar kampung untuk memperbaiki wajah kampung secara mandiri	Perbaikan wajah kampung (persentase desa yang tertata rapi)
	B.3.2 Meningkatkan tourism branding melalui optimalisasi pemanfaatan Teknologi dan Internet	B.3.2.1 Memanfaatkan layanan berbasis teknologi untuk meningkatkan branding kota Bogor	B.3.2.1.P.1 Program Kerjasama dengan perusahaan berbasis IT dalam pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan branding kota Bogor	Jumlah Kerjasama dengan perusahaan berbasis IT dalam pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan branding kota Bogor Jumlah masyarakat yang mengakses layanan berbasis IT terkait pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan branding kota Bogor

3.3. *Smart Economy*

Inisiatif pembangunan *Smart Economy* diantaranya dapat dilakukan pada beberapa indikator sebagai berikut:

a. Membangun ekosistem industri yang berdaya saing (industry)

Membangun daya saing industri daerah pada leading sector industri tertentu yang terintegrasi antara industri primer (misalnya pertanian, perikanan, peternakan dan lain-lain), industri sekunder (misalnya manufaktur, pengolahan, packaging dan lain-lain), dan industri tersier (misalnya pasar produk daerah).

b. Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat (*Welfare*)

- Mengembangkan program peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan rumah tangga (*income*)
- Program peningkatan penyerapan angkatan kerja (*employment*)
- Program pemberdayaan ekonomi masyarakat (*empowerment*).

c. Membangun Ekosistem Transaksi Keuangan (*Transaction*)

- Membangun ekosistem transaksi keuangan digital untuk menjamin kelancaran pembayaran menuju masyarakat yang *less cash*
- Mewujudkan masyarakat yang *bankable* dan memiliki akses terhadap permodalan
- Mewujudkan ekosistem ekonomi digital dengan mendorong masuknya industri ke *e-commerce* dan *marketplace*.

Dengan merujuk pada indikator di atas, maka strategi dimensi *Smart Economy* di Kota Bogor berikut indikator kinerja dan indikator SNI 37122:2019 adalah sebagaimana tercantum pada Tabel 3.3 berikut.

Tabel 3. 3 Strategi Dimensi Smart Economy

Sub-Dimensi	Sasaran	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja
Ec.1. EKOSISTEM INDUSTRI	Ec.1.1 Meningkatan kapasitas teknologi pendukung sistem digitalisasi yang menunjang peningkatan mutu produk unggulan Kota Bogor	Ec.1.1.1 Memfaatkan teknologi untuk meningkatkan mutu produk unggulan Kota Bogor	Ec.1.1.1.P.1 Program Kerjasama dengan perusahaan berbasis teknologi dalam meningkatkan mutu produk unggulan Kota Bogor	Jumlah Kerjasama dengan perusahaan berbasis teknologi dalam meningkatkan mutu produk unggulan Kota Bogor
			Ec.1.1.1.P.2 Program pelatihan pemanfaatan teknologi dalam proses produksi untuk meningkatkan mutu produk unggulan Kota Bogor	Prosentase Peningkatan penjualan produk unggulan Kota Bogor

Sub-Dimensi	Sasaran	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja
	Ec.1.2 Membangun Mitra dengan Masyarakat untuk menciptakan kreatifitas dan inovasi produk unggulan kota Bogor	Ec.1.1.2 Meningkatkan Kerjasama dengan komunitas dalam menciptakan kreatifitas dan inovasi produk unggulan kota Bogor	Ec.1.1.2.P.1 Program Kerjasama pelatihan dengan komunitas dalam menciptakan kreatifitas dan inovasi produk unggulan kota Bogor	Jumlah kerjasama pelatihan dengan komunitas dalam menciptakan kreatifitas dan inovasi produk unggulan kota Bogor
	Ec 1.3 Pemberdayaan dan peningkatan kualitas SDM UMKM, termasuk memfasilitasi akses pasar.	Ec.1.3.1 Penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pelatihan	Ec.1.3.1.P.1 Kerjasama dengan perguruan tinggi untuk mendirikan politeknik	Terselenggaranya pendidikan politeknik
		Ec.1.3.2 Pelibatan industri untuk peningkatan kompetensi masyarakat	Ec.1.3.2.P.1 Kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan industri untuk mendirikan Balai Latihan Kerja dan program pelatihan (bidang industri, pariwisata dan ekonomi kreatif)	Terselenggaranya pelatihan kerja siap pakai di BLK
		Ec.1.3.3 Pembuatan program-program inkubator untuk UMKM dan pemberdayaan	Ec.1.3.3 P 1 Pelatihan dan pendampingan tentang pemanfaatan TIK untuk bisnis UMKM	Persentase peningkatan UMKM yang didukung TIK

Sub-Dimensi	Sasaran	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja
		masyarakat sehingga siap masuk ke e-commerce		
			Ec.1.3.3 P 2 Promosi UMKM dan penyiapan pasar daring bersama yang didukung oleh Pemerintah Daerah.	Tersedianya fasilitas dan wadah pemasaran UMKM secara daring
	Ec 1.4 Integrasi antara pelaku usaha dengan manufaktur dan aksesibilitas ke pasar internasional	Ec.1.4.1 Meningkatkan kerja sama penggunaan dana CSR dari perusahaan-perusahaan besar yang memiliki pasar di Kota Bogor	Ec.1.4.1 P 1 Pembuatan program kerjasama CSR dari perusahaan besar di Kota Bogor untuk memajukan UMKM	MoU dengan perusahaan besar
Ec.2. KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Ec.2.1 Peningkatan literasi penggunaan Internet dengan bijak	Ec.2.1.1 Meningkatkan literasi penggunaan Internet dengan bijak	Ec.2.1.1.P.1 Program Pelatihan literasi digital bekerjasama dengan kominfo, perguruan tinggi dan komunitas Ec.2.1.1.P.2 Program Peningkatan awareness tentang penggunaan internet dengan bijak	Prosentase Peningkatan tingkat literasi digital masyarakat

Sub-Dimensi	Sasaran	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja
	Ec.2.2 Pendirian pusat-pusat Kawasan ekonomi kreatif sebagai destinasi wisata belanja baru	Ec.2.2.1 Mendirikan pusat-pusat Kawasan ekonomi kreatif sebagai destinasi wisata belanja baru	Ec.2.2.1.P.1 Kerjasama dengan pihak swasta dalam mendirikan pusat-pusat Kawasan ekonomi kreatif sebagai destinasi wisata belanja baru	Peningkatan jumlah pusat-pusat Kawasan ekonomi kreatif sebagai destinasi wisata belanja baru
	Ec 2.3 Program ketahanan usaha bagi wirausaha baru dan menengah.	Ec.2.3.1 Peningkatan program sosialisasi terkait ketahanan usaha bagi wirausaha baru dan menengah.	Ec.2.3.1.P.1 program sosialisasi terkait ketahanan usaha bagi wirausaha baru dan menengah.	Prosentase peningkatan usaha terdaftar yang dapat bertahan dalam kurun waktu 2 tahun.
		Ec.2.3.2 Mendirikan serta memanfaatkan Kerjasama inkubator bisnis dalam usaha meningkatkan ketahanan usaha bagi wirausaha baru dan menengah.	Ec.2.3.2.P.1 Program pendirian inkubator bisnis	Jumlah inkubator bisnis
			Ec. 2.3.2.P.2 Program Kerjasama inkubator bisnis dengan perguruan tinggi atau komunitas bisnis dalam usaha meningkatkan ketahanan usaha bagi wirausaha baru dan menengah.	Kerjasama inkubator bisnis dengan perguruan tinggi atau komunitas bisnis dalam usaha meningkatkan ketahanan usaha bagi wirausaha baru dan menengah.

Sub-Dimensi	Sasaran	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja
	Ec 2.4 Menggalakkan kampanye (#BogorLocalPride) untuk mengembangkan tumbuhnya bisnis digital dan persaingan yang sehat.	Ec.2.4.1 Meningkatkan awareness masyarakat terkait bisnis digital dan persaingan yang sehat	Ec.2.4.1.P.1 Program Peningkatan awareness masyarakat terkait bisnis digital dan persaingan yang sehat melalui media sosial, perusahaan dan lainnya.	Peningkatan bisnis UMKM lokal berbasis digital
Ec.3. EKOSISTEM TRANSAKSI KEUANGAN	Ec.3.1 Penyediaan akses permodalan bagi pelaku usaha dan wirausaha baru.	Ec.3.1.1 Peningkatan kesadaran masyarakat untuk menggunakan instrumen keuangan modern	Ec.3.1.1.P.1 Penyusunan program-program sinergi perbankan dengan UMKM	Jumlah kerjasama perbankan dengan UMKM (akumulasi jumlah)
			Ec.3.1.1.P.2 Sosialisasi literasi keuangan sehingga dapat memanfaatkan fleksibilitas less cash economy	Persentase peningkatan penggunaan metoda <i>cashless</i>
	Ec 3.2 Sosialisasi literasi keuangan sehingga dapat memanfaatkan fleksibilitas less cash economy	Ec.3.2.1 Meningkatkan literasi keuangan masyarakat	Ec.3.2.1.P.1 Kerjasama dengan perguruan tinggi dalam sosialisasi peningkatan literasi keuangan masyarakat melalui program pengabdian kepada masyarakat	Peningkatan tingkat literasi keuangan masyarakat

Sub-Dimensi	Sasaran	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja
	Ec 3.3 Integrasi antara pelaku usaha dengan manufaktur dan aksesibilitas ke pasar internasional dengan pemanfaatan e-commerce dan marketplace.	Ec.3.3.1 Penguatan Kerjasama antara antara pelaku usaha dengan manufaktur dan aksesibilitas ke pasar internasional dengan pemanfaatan e-commerce dan marketplace.	Ec.3.3.1.P.1 Program Kemitraan antara pelaku usaha dengan manufaktur aksesibilitas ke pasar internasional dengan pemanfaatan e-commerce dan marketplace.	Jumlah kemitraan antara pelaku usaha dengan manufaktur aksesibilitas ke pasar internasional dengan pemanfaatan e-commerce dan marketplace.

3.4. *Smart Living*

Inisiatif pembangunan *Smart Living* diantaranya dapat dilakukan pada beberapa indikator sebagai berikut:

a. Harmonisasi Tata Ruang Wilayah (*Harmony*)

Mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang nyaman dan harmonis antara lingkungan pemukiman (*residential*), lingkungan pusat kegiatan bisnis (*commercial*) yang didukung dengan fasilitas rekreasi untuk keluarga (*recreational*).

b. Mewujudkan Prasarana Kesehatan (*Health*)

Mewujudkan akses terhadap ketersediaan makanan dan minuman sehat (*food*), akses terhadap pelayanan kesehatan yang memadai (*healthcare*), dan akses terhadap sarana dan prasarana olahraga (*sport*).

c. Menjamin Ketersediaan Sarana Transportasi (*Mobility*)

Mewujudkan ekosistem transportasi yang menjamin mudahnya mobilitas (*mobility*) bagi individual, publik, maupun untuk pemenuhan kebutuhan logistik suatu daerah.

Dengan merujuk pada indikator di atas, maka strategi dimensi *Smart Living* di Kota Bogor berikut indikator kinerja dan indikator SNI 37122:2019 adalah sebagaimana tercantum pada Tabel 3.4 berikut.

Tabel 3. 4 Strategi Dimensi Smart Living

Sub-Dimensi	Sasaran	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja
Lv.1. HARMONISASI TATA RUANG	Lv.1.1 Optimalisasi penataan ruang wilayah dan pembangunan kota Bogor.	Lv.1.1.1 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang mendukung 6 dimensi <i>Smart City</i> sebagai turunan dari Perda RTRW terbaru	Lv.1.1.1.P.1 Penyusunan RDTR yang mendukung 6 dimensi <i>Smart City</i>	Persentase kemajuan penyusunan Rencana Detil Tata Ruang
			Lv.1.1.1.P.2 Sosialisasi Rencana Induk <i>Smart City</i> kepada setiap OPD dan masyarakat sebagai dasar pembangunan kota cerdas terpadu	Umpan balik penerapan masterplan dari setiap dinas terkait
	Lv.1.2 Peningkatan fasilitas kota ramah difabel, ramah anak dan ramah lansia	Lv.1.2.1 Program peningkatan fasilitas umum untuk masyarakat	Lv.1.2.1.P.1 Alokasi kawasan untuk pasar, terminal, SPBU dan sekolah	Ketersediaan jumlah lahan untuk rencana pembangunan fasilitas umum sesuai RTRW/RDTR
			Lv.1.2.1.P.2 Pengurangan luasan kawasan kumuh	Persentase luas kawasan kumuh
		Lv.1.2.2 Pemenuhan kebutuhan air bersih	Lv.1.2.2.P.1 Perluasan jaringan PDAM	Persentase luas daerah jaringan PDAM dibandingkan perencanaan
			Lv.1.2.2.P.2 Pembayaran iuran air bersih secara online/cashless	Terimplementasinya pembayaran iuran air bersih secara online/cashless (persentase kemajuan pengembangan program)

Sub-Dimensi	Sasaran	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja
	Lv.1.3 Mewujudkan lingkungan pemukiman yang nyaman dan harmonis	Lv.1.3.1 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang layak	Lv.1.3.1.P.1 Program Peningkatan kualitas air bersih	Peningkatan jumlah debit air bersih
			Lv.1.3.1.P.2 Peningkatan ketersediaan rumah layak huni	Prosentase cakupan ketersediaan rumah layak huni
			Lv.1.3.1.P.3 Program layanan penampungan air limbah rumah tangga	Prosentase kepala keluarga yang terlayani penampungan air limbah rumah tangga
Lv.2. KESEHATAN	Lv.2.1 Peningkatan kualitas layanan dan sarana di Puskesmas dan RSUD	Lv.2.1.1 Peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas kesehatan	Lv.2.1.1.P.1 Penambahan RSUD dan Puskesmas	Rasio fasilitas kesehatan terhadap penduduk
			Lv.2.1.1.P.2 Implementasi Sistem Informasi Manajemen RSUD	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase kemajuan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit terpadu • Pendaftaran calon pasien RSUD secara online
			Lv.2.1.1.P.3 Layanan Telemedicine untuk dokter spesialis	Persentase kemajuan pengembangan Layanan Telemedicine

Sub-Dimensi	Sasaran	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja
		Lv.2.1.2 Peningkatan jumlah tenaga Kesehatan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan	Lv.2.1.2.P.1 Beasiswa ikatan dinas untuk mahasiswa kedokteran atau residen program spesialis yang dibutuhkan	Rasio dokter per penduduk (dokter umum, spesialis dan dokter gigi)
			Lv.2.1.2.P.2 Pelatihan dan penyiapan uji kompetensi bagi tenaga kesehatan	Persentase tenaga kesehatan lulus uji kompetensi
		Lv.2.1.3 Layanan kegawatdaruratan pada bencana	Lv.2.1.3.P.1 Pembuatan Public Service Center untuk tanggap darurat bencana	Kemajuan Terbangunnya Public Service Center untuk tanggap darurat bencana secara bertahap
Lv.2.2 Menjadikan Puskesmas sebagai pusat informasi/ penyuluhan kesehatan bagi masyarakat	Lv.2.2.1 Puskesmas harus menjadi pusat informasi penyuluhan kesehatan bagi masyarakat	Lv.2.2.1.P.1 Pembuatan program penyuluhan berkala tentang kesehatan lingkungan dan peningkatan gizi masyarakat	Lv.2.2.1.P.1 Pembuatan program penyuluhan berkala tentang kesehatan lingkungan dan peningkatan gizi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran) • Angka Stunting
			Lv.2.2.1.P.2 Pembuatan program penyuluhan keluarga berencana	Angka akseptor KB dari pasangan usia subur
Lv.2.3 Peningkatan akses terhadap sarana olahraga masyarakat	Lv.2.3.1 Penyediaan sarana olah raga gratis bagi masyarakat	Lv.2.3.1.P.1 Kerjasama dengan perusahaan dalam penyediaan sarana olah raga gratis bagi masyarakat	Jumlah sarana olah raga yang dapat diakses oleh masyarakat secara gratis	

Sub-Dimensi	Sasaran	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja
Lv.3. TRANSPORTASI	Lv.3.1 Menciptakan sistem transportasi terpadu dengan manajemen rekayasa lalu lintas	Lv.3.1.1 Penataan layanan transportasi umum terpadu	Lv.3.1.1.P.1 Penataan transportasi umum terpadu sebagai bagian dari layanan transportasi Jabodetabek	Persentase perkembangan penataan transportasi umum dibandingkan dengan rencana
			Lv.3.1.1.P.2 Penambahan akses rute jalan dan sarana/trayek transportasi umum menuju ruang public dan Kawasan pemukiman.	Jumlah akses rute jalan/ trayek transportasi umum (bis).
	Lv.3.2 Menciptakan sistem transportasi yang ramah lingkungan	Lv.3.2.1 Penataan sarana dan prasarana transportasi publik ramah lingkungan	Lv.3.2.1.P.1 Penataan sarana dan prasarana transportasi publik dengan energi ramah lingkungan	Persentase transportasi umum ramah lingkungan
			Lv.3.2.1.P.2 Penyediaan fasilitas pembayaran transportasi publik secara <i>cashless</i> .	Persentase transportasi umum ramah yang dapat dibayar secara <i>cashless</i>

Sub-Dimensi	Sasaran	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja
		Lv.3.2.2 Penyediaan sarana transportasi alternatif	Lv.3.2.2.P.1 Penyediaan sarana transportasi berbasis rel dan <i>skywalk</i>	Persentase penambahan sarana transportasi dibandingkan dengan rencana
		Lv.3.2.3 Pengontrolan kelaikjalan transportasi terhadap sarana	Lv.3.2.3.P.1 Peningkatan layanan pada aplikasi KIR berbasis TIK	Kemajuan implementasi layanan KIR secara daring
			Lv.3.2.3.P.2 Peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang lolos emisi gas buang	Persentase kendaraan bermotor yang lolos emisi gas buang

3.5. *Smart Society*

Inisiatif pembangunan *Smart Society* di antaranya dapat dilakukan pada beberapa indikator sebagai berikut:

a. **Mewujudkan Interaksi Masyarakat Yang Efisien (*Community*)**

- Interaksi sosial masyarakat terjadi secara paralel antara individu dengan individu yang lain, individu dengan kelompok sosial, dan antar kelompok sosial, baik secara fisik maupun virtual (digital) dengan sasaran mewujudkan partisipasi publik dalam pembangunan daerah. Contoh: berbagai program untuk mendukung berbagai kemajuan *Smart City* misalnya program-program kepemudaan, peningkatan keahlian UMKM dan lain-lain.
- Pengembangan komunitas warga melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia baik secara individu, sosial mampu memanfaatkan lingkungan digital dengan positif dan produktif. Misalnya edukasi tentang market place dan lain-lain.

b. **Membangun Ekosistem Belajar Yang Efisien (*Learning*)**

- Mewujudkan ekosistem pendidikan yang saling mendukung antara pendidikan formal dan non-formal untuk memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh lapisan masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap pendidikan termasuk bagi masyarakat yang disable
- Membangun platform edukasi bagi masyarakat misalnya *smart school*, *smart campus*, *smart pesantren*, *smart training* program dan lain-lain.

c. **Mewujudkan Sistem Keamanan Masyarakat (*Security*)**

Mewujudkan suatu sistem atau manajemen keamanan dan keselamatan bagi masyarakat baik perlindungan keselamatan jiwa, keselamatan properti atau harta benda, dan keselamatan atas risiko bencana bagi masyarakat dengan memanfaatkan sumberdaya dan alat kelengkapan pemerintah maupun teknologi sensor digital atau *Internet of Things* (IoT).

Dengan merujuk pada indikator di atas, maka strategi dimensi *Smart Society* di Kota Bogor berikut indikator kinerja dan indikator SNI 37122:2019 adalah sebagaimana tercantum pada **Kesalahan! Sumber referensi tidak ditemukan.** berikut.

Tabel 3. 5 Strategi Dimensi Smart Society

Sub-Dimensi	Sasaran	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja
S.1. INTERAKSI MASYARAKAT	S.1.1 PEMBERDAYAAN komunitas adat, komunitas pemuda dan masyarakat untuk mewujudkan partisipasi publik	S.1.1.1 Meningkatkan aktivitas dan komunikasi masyarakat dalam kolaborasi positif	S.1.1.1.P.1 Pengembangan program (aplikasi dan konten digital) pemberdayaan komunitas (Rumah Baca, Kursus Keterampilan, Adat, Seni Budaya, dsb.)	Jumlah inovasi yang dihasilkan oleh komunitas
			S.1.1.1.P.2 Event ekspose & pameran yang menampilkan inovasi lokal dari komunitas agar dapat perhatian dan dikembangkan oleh investor atau pelaku usaha	Peserta event ekspose dan pameran
		S.1.1.2 Kerjasama dengan perusahaan/ industri yang memiliki dana CSR	S.1.1.2.P.1 Mengarahkan dana CSR kepada program-program edukasi komunitas (perpustakaan, forum-forum edukasi) serta beasiswa.	Akumulasi jumlah program edukasi komunitas yang dibiayai anggaran CSR perusahaan
			S.1.1.2.P.2 Mengarahkan dana CSR untuk pembangunan fasilitas kota bagi masyarakat berkebutuhan khusus	Jumlah implementasi program fasilitas kota bagi masyarakat berkebutuhan khusus

Sub-Dimensi	Sasaran	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja
	S.1.2 Peningkatan keterlibatan masyarakat pemuda dan UMKM dalam pembangunan kota Bogor.	S.1.2.1 Meningkatkan aktivitas dan komunikasi masyarakat dalam kolaborasi positif	S.1.2.1.P.1 Meningkatkan peran serta kepemudaan dalam kegiatan pemuda pelopor, pemuda wirausaha, pertukaran pemuda antar negara, jambore pemuda dan jambore komunitas	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kepeloporan, Kewirausahaan, Jambore Pemuda dan Jambore Komunitas
	S.1.3 Peningkatan literasi digital dengan program sosialisasi terutama digital ethics dan digital security	S.1.3.1 Mengembangkan metodologi e-learning bagi siswa SD, SMP dan SMA atau sederajat	S.1.3.1.P.1 Program pengembangan metodologi e-learning terutama digital ethics dan digital security bagi siswa SD, SMP dan SMA	Persentase Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar dan Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas yang Menyelenggarakan e-Learning
		S.1.3.2 Mengkampanyekan peningkatan kesadaran pemanfaatan gawai dan internet secara positif dan produktif serta cara bersosial media secara cerdas, sehat, dan anti diskriminasi sara.	S.1.3.2.P.1 Program Kerjasama Antara Pemerintah Daerah Dengan Stakeholders Relawan TIK terkait kampanye kesadaran pemanfaatan gawai dan internet serta cara bersosial media secara cerdas, sehat, dan anti diskriminasi sara.	Jumlah Kegiatan Bersama Antara Pemerintah Daerah Dengan Stakeholders Relawan TIK.

Sub-Dimensi	Sasaran	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja
S2. EKOSISTEM BELAJAR/ PENDIDIKAN	S.2.1 Mendorong peningkatan kompetensi guru dan pengajar	S.2.1.1 Penyelenggaraan pendidikan siap pakai	S.2.1.1.P.1 Pembuatan pendidikan vokasi (SMK & Politeknik) di bidang yang berpotensi membangun daerah (pariwisata, kesehatan, dll)	Jumlah pendidikan vokasi (SMK dan Perguruan Tinggi Vokasi atau Politeknik)
			S.2.1.1.P.2 Penyediaan lapangan pekerjaan untuk penerima beasiswa	Peningkatan persentase penyerapan tenaga kerja untuk penerima beasiswa
		S.2.1.2 Peningkatan kualitas pendidikan SDM	S.2.1.2.P.1 Penyediaan beasiswa S2 untuk ASN	Alokasi anggaran beasiswa S2 untuk ASN (jumlah penerima beasiswa)
			S.2.1.2.P.2 Penyediaan beasiswa tenaga pendidik ke jenjang S1	Alokasi anggaran beasiswa tenaga pendidik ke jenjang S1 (persentase pendidik yang menerima beasiswa pendidikan S1)
	S.2.2 Peningkatan literasi baca masyarakat melalui penggunaan TIK	S.2.2.1 Peningkatan sarana pendidikan online	S.2.2.1.P.1 Perbaikan akses infrastruktur digital dan perangkat pendukungnya (komputer) di sekolah-sekolah untuk peningkatan kualitas pendidikan	Persentase sekolah (SD & SMP) yang didukung jaringan internet dan pendukung TIK yang memadai
			S.2.2.2 Peningkatan minat baca dan kualitas literasi peserta didik	Tersedianya perpustakaan keliling di lokasi-lokasi berkumpulnya anak-anak usia sekolah

Sub-Dimensi	Sasaran	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja
	S.2.3 Perbaikan akses infrastruktur digital di sekolah-sekolah untuk peningkatan kompetensi siswa.	S.2.3.1 Kerjasama dengan perusahaan/ industri yang memiliki dana CSR	S.2.3.1.P.1 Mengarahkan dana CSR kepada program-program Peningkatan akses infrastruktur digital di sekolah-sekolah untuk peningkatan kompetensi siswa.	Akumulasi jumlah program akses infrastruktur digital di sekolah-sekolah untuk peningkatan kompetensi siswa yang dibiayai anggaran CSR perusahaan.
	S.2.4 Peningkatan penerima beasiswa terutama untuk masyarakat difabel	S.2.4.1 Kerjasama dengan perusahaan/ industri yang memiliki dana CSR	S.2.4.1.P.1 Mengarahkan dana CSR kepada program-program beasiswa.	Akumulasi jumlah program beasiswa yang dibiayai anggaran CSR perusahaan
S.3. KEAMANAN MASYARAKAT	S.3.1 Penyediaan/perbaikan sistem peringatan dini terhadap bencana berbasis teknologi dan informasi.	S.3.1.1 Peningkatan kualitas keamanan dan ketentraman masyarakat	S.3.1.1.P.1 Pengembangan sistem keamanan terpadu yang didukung TIK secara bertahap (kamera pengamat pada lokasi rawan, sistem pengaduan, sistem peringatan dini keamanan)	Persentase wilayah kota yang dilayani sistem keamanan terpadu
			S.3.1.1.P.2 Pengembangan program penyuluhan untuk perlindungan perempuan dan anak	Tersedianya program dan anggaran untuk perlindungan perempuan dan anak (persentase kecamatan yang terlayani program penyuluhan)

Sub-Dimensi	Sasaran	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja
	S.3.2 Penyediaan sarana dan Prasarana bagi masyarakat difabel	S.3.2.1 Kebijakan penyediaan sarana prasarana untuk masyarakat difabel oleh penyelenggara layanan publik/ masyarakat	S.3.2.1.P.1 Mengarahkan penyelenggara layanan publik/ masyarakat untuk menyediakan sarana prasarana untuk masyarakat difabel melalui instruksi walikota	Implementasi jumlah sarana prasarana di penyedia layanan publik.
	S.3.3 Penguatan koordinasi dan kerjasama dengan TNI, POLRI, dan Kejaksaan untuk menciptakan stabilitas keamanan kondusif	S.3.3.1 Peningkatan Kerjasama dengan TNI, POLRI, dan Kejaksaan di bidang stabilitas keamanan.	S.3.3.1.P.1 Program Kerjasama dengan TNI, POLRI, dan Kejaksaan di bidang stabilitas keamanan seperti Peningkatan sinergitas tiga pilar desa (Petinggi, Babinsa, Bhabinkamtibmas) melalui penyuluhan tentang bela negara cinta tanah air kesadaran berbangsa dan bernegara, terlibat dalam pembinaan kepramukaan dan mensosialisasikan pentingnya nilai-nilai kejuangan.	Jumlah kegiatan di bidang stabilitas keamanan seperti penyuluhan dan partisipasi dalam pembinaan kepramukaan dan sosialisasi nilai kejuangan.

3.6. *Smart Environment*

Inisiatif pembangunan *Smart Environment* di antaranya dapat dilakukan pada beberapa indikator sebagai berikut:

a. **Mengembangkan Program Proteksi Lingkungan (*Protection*)**

- Mengembangkan sistem tata kelola perlindungan sumber daya tanah, air, dan udara serta mengintegrasikannya dengan teknologi pelaporan dan monitoring pencemaran, misalnya dengan teknologi sensor pada *Internet of Things* (IoT).
- Membangun ruang terbuka hijau
- Melakukan restorasi sungai yang memiliki tingkat pencemaran tinggi
- Mengendalikan polusi udara

b. **Mengembangkan Tata Kelola Sampah dan Limbah (*Waste*)**

- Mengembangkan sistem tata kelola sampah rumah tangga (*household*)
- Mengembangkan sistem tata kelola limbah industri (*industrial*)
- Mengembangkan sistem tata kelola limbah dan sampah publik (*public*)
- Menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan agar tidak mengganggu pemandangan, tidak merusak indra penciuman, dan menghindari banjir akibat genangan sampah yang menyumbat saluran-saluran pembuangan limbah atau sirkulasi air residensial serta ketersediaan sistem sanitasi rumah tangga, industri dan publik yang baik dan bertanggung-jawab.

c. **Mengembangkan Tata Kelola Energi Yang Bertanggung-jawab**

- Pemanfaatan energi yang efisien dan bertanggungjawab
- Pengembangan energi alternatif yang ramah lingkungan (*environmentally friendly*) dan berkelanjutan (*sustainable*) serta terjangkau bagi masyarakat. Misalnya pemanfaatan limbah/sampah sebagai biogas, energi surya, tenaga angin, biomassa (tumbuhan dan hewan) dan lain-lain.

Dengan merujuk pada indikator di atas, maka strategi dimensi *Smart Environment* di Kota Bogor berikut indikator kinerja dan indikator SNI 37122:2019 adalah sebagaimana tercantum pada Tabel 3.6 berikut.

Tabel 3. 6 Strategi Dimensi Smart Environment

Sub-Dimensi	Sasaran	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja
En.1. PROTEKSI LINGKUNGAN	En.1.1 Meningkatkan sistem tata kelola perlindungan sumberdaya alam berbasis teknologi	En.1.1.1 Pemantauan kualitas lingkungan hidup	En.1.1.1.P.1 Pembangunan sistem pemantauan kualitas udara dan air	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah stasiun peman-tauan udara per Km² • Jumlah stasiun pemantauan kualitas air per 100.000 penduduk
		En.1.1.2 Penyediaan fasilitas mitigasi bencana	En.1.1.2.P.1 Penyediaan/perbaikan sistem peringatan dini bencana banjir	Tersedianya sistem peringatan dini banjir
	En.1.2 Meningkatkan ruang terbuka hijau	En.1.2.1 Penyediaan kebijakan & regulasi tentang lingkungan	En.1.2.1.P.1 Mengalokasikan fungsi Kawasan Lindung, pemanfaatan jaringan jalan sebagai sarana penghijauan dan mengatur kepadatan bangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan dan perlindungan Kawasan Lindung • Jumlah sarana penghijauan di jaringan jalan • Presentase kepadatan bangunan di Kota Bogor
En.2 PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH	En.2.1 Pengembangan Tata Kelola Sampah dan Limbah rumah tangga, industri dan sampah publik	En.2.1.1 Mendorong pengelolaan sampah mandiri (“bank sampah” dsb) untuk mengurangi sampah rumah tangga yang harus dikelola pemerintah kota	En.2.1.1.P.1 Penyediaan fasilitas dan Sosialisasi penanganan mandiri sampah organik	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase sampah anorganik yang didaur ulang • Persentase keluarga yang aktif dalam program bank sampah
			En.2.1.1.P.2 Pembuatan & sosialisasi program bank sampah	

Sub-Dimensi	Sasaran	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja
	En. 2.2 Mendorong pemberdayaan TPST, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu di masing masing RW	En.2.2.1 Mengadakan Pendampingan kepada masyarakat dalam pengelolaan secara teknis, kelembagaan dan pendanaan	En.2.2.1.P.1 Program Pendampingan kepada masyarakat dalam pengelolaan secara teknis, kelembagaan dan pendanaan	Adanya lembaga kelompok masyarakat sebagai organisasi pengelola yang tidak formal namun terlegalisir serta sesuai dengan aspirasi masyarakat. Jumlah Program pendampingan kepada masyarakat dalam pengelolaan secara teknis, kelembagaan dan pendanaan
		En.2.2.2 Meningkatkan peningkatan sarana dan sarana, legalitas kelembagaan dan teknis pengelolaan persampahan.	En.2.2.2.P.1 Program peningkatan sarana dan sarana, legalitas kelembagaan dan teknis pengelolaan persampahan.	Luasan pelayanan TPST skala RW (200 rumah) Adanya peraturan setingkat kelurahan untuk pelaksanaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Persenntase dana untuk operasional pengelolaan maupun biaya pemeliharaan atau investasi penambahan prasarana dan sesuai dengan kebutuhan.
		En.2.2.3 Pengembangan tempat pengolahan sampah melalui pengomposan dan daur ulang sampah anorganik.	En.2.2.3.P.1 Program pengomposan dan daur ulang sampah anorganik.	Volume sampah terangkut ke TPA
		En.2.2.4 Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan ibu-ibu rumah tangga dalam pengelolaan sampah.	En.2.2.4.P.1 Program sosialisasi reduksi sampah rumah tangga	Persentase Reduksi Sampah Rumah Tangga

Sub-Dimensi	Sasaran	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja
	En. 2.3 Sosialisasi peningkatan kesadaran dalam penanganan sampah	En.2.3.1 Meningkatkan kesadaran maskayarat dalam penanganan sampah	En.2.3.1.P.1 Program sosialisasi kesadaran maskayarat dalam penanganan sampah	Jumlah Program sosialisasi kesadaran maskayarat dalam penanganan sampah
En.3. TATA KELOLA ENERGI	En.3.1 Pemanfaatan energi efisien yang bertanggungjawab	En.3.1.1 Pembangkitan listrik dari energi terbarukan	En.3.1.1.P.1 Implementasi pembangkit listrik tenaga surya	Persentase peningkatan daya listrik yang dihasilkan (kVA)
			En.3.1.1.P.2 Implementasi pembangkit listrik mikrohidro	Persentase peningkatan daya listrik yang dihasilkan (kVA)
			En.3.1.1.P.3 Perbaikan Penerangan Jalan Umum bertenaga surya	Persentase penerangan jalan yang beroperasi dengan baik menggunakan sistem manajemen kinerja cahaya/lampu dan tenaga surya
	En.3.1.2 Kerjasama penyediaan listrik <i>on-grid</i> dengan pihak swasta	En.3.1.2.P.1 Pengembangan pembangkitan listrik dari energi terbarukan baik dari APBD maupun pihak ketiga (<i>on grid</i> dan <i>off grid</i>)	Kemajuan pengembangan program	
En 3.2 Mengembangkan energi alternatif ramah lingkungan terjangkau masyarakat	En.3.2.1 Mendorong pemanfaatan tenaga aliran sungai sebagai sumber tenaga listrik skala kecil bagi rumah tangga	En.3.2.1.P.1 Program pembangunan Stasiun Hidrologi Listrik Skala Kecil (Mikrohidro)	Terbangunnya Stasiun Hidrologi Listrik Skala Kecil (Mikrohidro)	

4. PETA JALAN *SMART CITY*

Roadmap dalam Rencana Induk atau yang diterjemahkan sebagai peta jalan adalah salah satu luaran utama yang berisi rencana strategis dalam mendefinisikan tujuan atau hasil yang diinginkan dan mencakup langkah-langkah utama yang dibutuhkan untuk pencapaiannya. Fungsi peta jalan adalah sebagai acuan dalam menjalankan program/kegiatan, serta sebagai alat untuk mengkomunikasikan rencana strategis.

Peta jalan sebetulnya belum mencakup detail pekerjaan atau rencana aksi yang harus dilakukan untuk suatu program atau strategi, sehingga nantinya peta jalan tersebut harus dideskripsikan lebih rinci dengan dokumen persyaratan (*requirement*) teknis untuk infrastruktur dan aplikasi yang akan dibangun. Termasuk di dalamnya: kebijakan, kelembagaan, kompetensi dan kuantitas sumber daya manusia yang dibutuhkan.

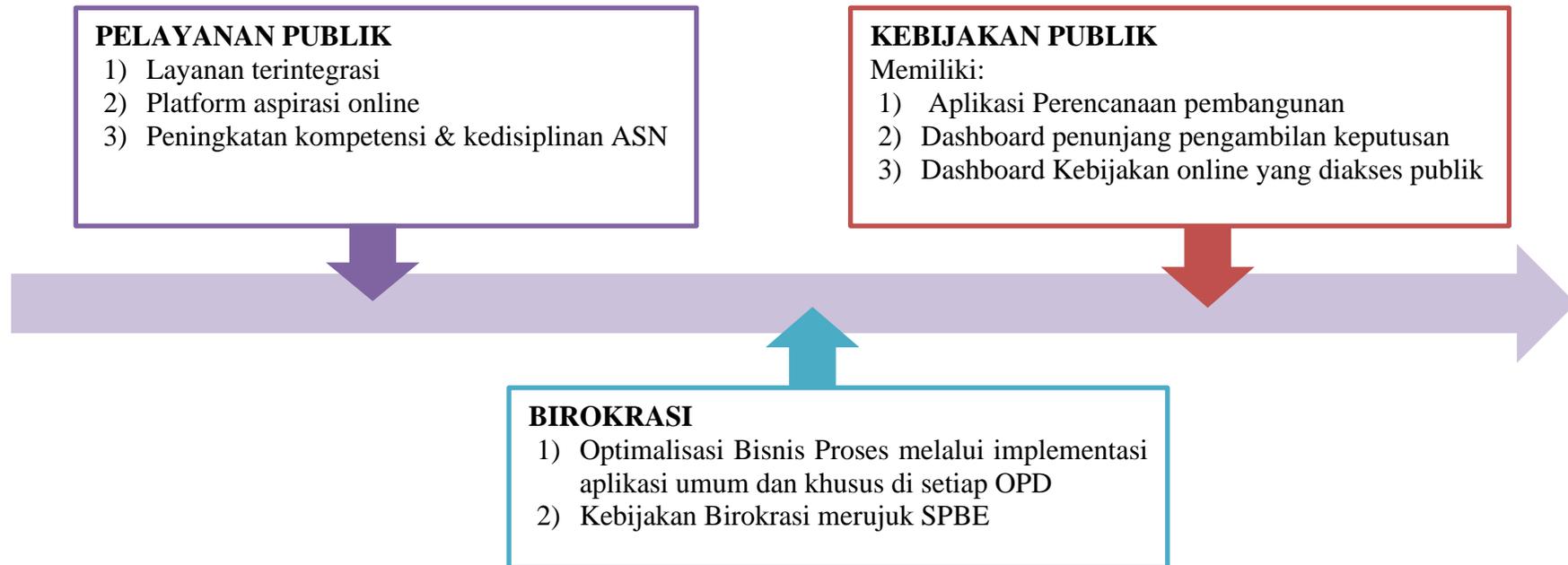
Dalam konsep *Smart City* inovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sangatlah penting untuk menyelesaikan berbagai tantangan yang dihadapi daerah. Pemerintah Daerah dipacu untuk berpikir kreatif dan aktif dalam melahirkan inovasi-inovasi untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera, sehat, nyaman, dan aman.

Rencana Induk *Smart City* ini juga mewadahi inovasi yang muncul untuk menjadi bagian dari suatu rencana implementasi yang terintegrasi dan komprehensif dan mencapai sasaran *Smart City* yang telah ditetapkan

4.1. Peta Jalan *Smart Governance*

Peta jalan pembangunan *Smart City* untuk dimensi *Smart Governance* periode jangka pendek dan menengah (1-5 tahun) disajikan dalam tabel berikut:

4.1.1. Peta Jalan *Smart Governance* Untuk Jangka Pendek Dan Jangka Menengah



Gambar 4. 1 Peta Jalan Jangka Pendek dan Menengah *Smart Governance* Kota Bogor

Tabel 4. 1 Peta Jalan Dimensi Smart Governance Untuk Jangka Pendek dan Jangka Menengah

Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja					Sumber Dana	Leading Sector
				2023	2024	2025	2026	2027		
Sub Dimensi										
G.1.1.1 Pengembangan layanan publik terintegrasi yang didukung TIK	G.1.1.1.P.1 Pengembangan sistem pelayanan satu pintu terintegrasi antar OPD: Kependudukan, IMB, NIB dll.	Percepatan pelayanan publik (persentase implementasi sistem pelayanan satu pintu terintegrasi)	Layanan 1 pintu yang terintegrasi dengan seluruh OPD teknis, agar layanan dikelola lebih cepat	50%	100%	100%	100%	100%	APBD	DPMPSTP
	G.1.1.1.P.2 Implementasi layanan kependudukan di tingkat kecamatan	Persentase perluasan layanan publik terdigitalisasi (persentase jumlah kecamatan yang terimplementasi)	Sistem sederhana menggunakan Whatsapp sebagai Antisipasi terhadap mahalnya biaya perjalanan	20%	50%	80%	100%	100%	APBD	Dinas Dukcapil
	G.1.1.1.P.3 Aplikasi Pembayaran Pajak dan Retribusi untuk diimplementasikan di tingkat kecamatan	Peningkatan pendapatan pajak dan retribusi di tingkat kecamatan (persentase jumlah kecamatan yang terimplementasi)	Distribusi kewenangan ke tingkat kecamatan, mengantisipasi sulitnya pengumpulan pajak & retribusi jika harus dilakukan oleh Dispenda	20%	50%	80%	100%	100%	APBD	Bapenda
G.1.2.1 Membangun platform penampung aspirasi masyarakat	G.1.2.1.P.1 Penambahan fungsi dan fitur penyampaian aspirasi dan komentar di setiap situs web OPD	Tersampainya pengaduan masyarakat ke tiap OPD (tersedianya fungsi pengaduan pada seluruh website OPD)	Masyarakat dapat menyampaikan aspirasi & kritik terhadap layanan OPD secara langsung di situs web OPD terkait	20%	50%	80%	100%	100%	APBD	Dinas Kominfo dan Persandian
	G.1.2.1.P.2 Pembangunan pengaduan online (pengaduan, saran, kritik): Aplikasi mobile, SMS, Whatsapp, dll.	Terbentuknya database aspirasi masyarakat (kemajuan pembangunan aplikasi)	Laporan aspirasi & keluhan masyarakat dapat langsung disajikan dalam laporan untuk kemudian ditindak lanjuti	50%	80%	100%	100%	100%	APBD	Dinas Kominfo dan Persandian

Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja					Sumber Dana	Leading Sector
				2023	2024	2025	2026	2027		
G.1.3.1 Pengembangan inovasi berbasis Publik yang memberikan dampak positif kepada pemerintahan	G.1.3.1.P.1 Pembangunan aplikasi berbasis komunitas untuk mempermudah masyarakat mengakses semua layanan publik	Terbentuknya aplikasi untuk akses layanan publik dalam 1 aplikasi mobile	Tersedianya 1 Aplikasi mobile terintegrasi untuk layanan publik (QW)	50%	80%	100%	100%	100%	APBD	Dinas Kominfo dan Persandian
	G.1.3.1.P.2 Penyediaan sarana akses data dan informasi yang dapat digunakan untuk mengembangkan aplikasi oleh masyarakat	Penyediaan Data Terbuka yang dapat diakses publik	Tersedianya Akses publik terhadap data terbuka	50%	80%	100%	100%	100%	APBD	Dinas Kominfo dan Persandian
G.1.4.1 Peningkatan kompetensi TIK bagi ASN	G.1.4.1.P.1 Pelatihan dasar untuk penyeragaman standarisasi literasi TIK (matrikulasi)	Persentase OPD yang menerapkan SPBE	Persentase ASN terhadap TIK akan meningkat yang akan memicu efektivitas kinerja tiap personil	25%	50%	75%	100%	100%	APBD	Diskominfo
	G.1.4.1.P.2 Pelatihan kompetensi analisis proses bisnis untuk tiap OPD (untuk menyusun proses bisnis demi peningkatan kinerja dengan dukungan TIK)	Persentase OPD yang menerapkan efektivitas dan efisiensi proses bisnis/ proses kerja	Proses bisnis setiap OPD dapat dioptimalkan jika ada personilnya sendiri yang menganalisis masalahnya	25%	50%	75%	100%	100%	APBD	Diskominfo
	G.1.4.1.P.3 Perekrutan ASN berlatar belakang TIK secara bertahap	Peningkatan literasi TIK (persentase ASN yang mengikuti program)								
G.1.4.2 Peningkatan kedisiplinan ASN G.1.4.3	G.1.4.2.P.1 Implementasi Sistem Presensi (kehadiran) Elektronik dan penerapan tunjangan kinerja	Tersedianya analisis bisnis untuk tiap OPD untuk penyusunan proses bisnis berbasis TIK (persentase OPD yang memiliki analisis bisnis)	Akan meningkatkan persentase literasi TIK di Pemkot Bogor	20%	40%	60%	80%	100%	APBD	BKPSDM

Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja					Sumber Dana	Leading Sector
				2023	2024	2025	2026	2027		
Sub Dimensi :										
G.2.1.1 Mengimplementasikan aplikasi umum di seluruh OPD secara bertahap	G.2.1.1.P.1 Pembangunan dan/atau implementasi aplikasi umum pemerintahan: <ul style="list-style-type: none"> • Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan • Sistem perencanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan. • JDIH • Persuratan elektronik (Surat Masuk, Surat Keluar, Nota Dinas, dll.) • Tata Naskah (SK, SE, dll.). 	Persentase OPD yang menerapkan SPBE	Penerapan SLA untuk pengolahan tata naskah akan meningkatkan kinerja pengelolaannya							Persandian Sekda
G.2.1.2 Melakukan analisis proses bisnis untuk membangun aplikasi khusus di setiap OPD secara bertahap	G.2.1.2.P.1 Analisis proses bisnis di tiap OPD untuk efisiensi dan efektivitas layanan birokrasi	Persentase OPD yang menerapkan efektivitas dan efisiensi proses bisnis/ proses kerja	Proses bisnis di tiap OPD selalu dapat dioptimalkan sehingga dapat meningkatkan kinerja	25%	50%	75%	100%	100%	APBD	- Dinas Kominfo - Setiap OPD

Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja					Sumber Dana	Leading Sector
				2023	2024	2025	2026	2027		
G.2.2.1 Standarisasi pembangunan aplikasi penghubung layanan yang mendukung integrasi data antar aplikasi	G.2.2.1.P.1 Mengatur penerapan system penghubung layanan IPPD sesuai dengan Perpres No. 95 tahun 2018	Tersedianya kebijakan dan tatakelola pembangunan aplikasi dan layanan penghubung yang terintegrasi dan saling terhubung							APBD	
	G.2.2.1.P.2 Mengintegrasikan Database aplikasi yang telah ada dalam system satu data	Tersedianya database sebagai acuan implementasi satu data								
	G.2.2.1.P.3 Menyediakan API management sebagai penghubung layanan antar aplikasi sehingga seluruh data terintegrasi	Tersedianya API sebagai acuan pembangunan aplikasi dan integrase data								
G.2.2.2 Penggunaan aplikasi berbagi pakai secara optimal	G.2.2.2.P.1 Pemanfaatan aplikasi berbagi pakai yang disediakan oleh keenterian terkait secara optimal	Tersedianya aplikasi berbagi pakai yang dimanfaatkan secara optimal								
G.2.3.1 Menetapkan Kebijakan-kebijakan terkait sesuai ketentuan SPBE yang tercantum dalam Permen PANRB nomor 59 tahun 2020	G.2.3.1.P.2 Menetapkan kebijakan-kebijakan terkait Teknologi Informasi dan Teknologi Komunikasi Informasi sejalan dengan Permen PANRB	Telah diimplementasikannya semua kebijakan terkait TI dan TIK sesuai dengan acuan yang di tetapkan Permen PANRB							APBD	
Sub Dimensi:										
G.3.1.1 Aplikasi perencanaan pembangunan	G.3.1.1.P.1 Musrenbang online	Persentase terimplementasinya Musrenbang online di tiap kecamatan	Riwayat penyampaian aspirasi selalu tercatat termasuk juga eskalasinya	50%	75%	100%	100%	100%	APBD	BAPELIT BANGDA

Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja					Sumber Dana	Leading Sector
				2023	2024	2025	2026	2027		
G.3.1.2 Pembangunan dashboard pendukung pengambilan kebijakan	G.3.1.2.P.1 Pembangunan dashboard untuk evaluasi dan pendukung pengambilan kebijakan	Kemajuan terbangunnya dashboard lengkap untuk pengambilan kebijakan pimpinan	Kebijakan bisa diambil dengan lebih akurat karena didukung data komprehensif dalam platform tunggal	50%	75%	100%	100%	100%	APBD	Diskominfo BAPELIT BANGDA
G.3.2.1 Pembuatan SOP dan tatakelola untuk kebijakan publik yang memberikan kepastian dan kejelasan bagi masyarakat	G.3.2.1.P.1 Pemanfaatan media elektronik dan aplikasi untuk memudahkan publik mengakses SOP dan Tatakelola terkait kebijakan-kebijakan publik	Kebijakan Publik berupa SOP dan tatakelola dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat								

4.2. Peta Jalan *Smart Branding*

Peta jalan pembangunan *Smart City* untuk dimensi *Smart Branding* periode jangka pendek dan menengah (1-5 tahun) disajikan dalam tabel berikut:

4.2.1. Peta Jalan *Smart Branding* untuk Jangka Pendek dan Jangka Menengah



Gambar 4. 2 Peta Jalan *Smart Branding* Jangka Pendek dan Jangka Menengah Kota Bogor

Tabel 4. 2 Peta Jalan Dimensi Smart Branding Untuk Jangka Pendek dan Jangka Menengah

Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja					Sumber dana	Leading Sector
				2023	2024	2025	2026	2027		
B.1.1.1 Meningkatkan event- event budaya berskala nasional dan internasional secara teratur	B.1.1.1.P.1 Pembuatan program dan event berskala nasional dan internasional	Akumulasi jumlah event wisata nasional/ internasional dan kerjasama dalam kawasan	Program event akan meningkatkan angka wisatawan secara langsung	12	12	24	24	24	APBD	Dinas Pariwisata
	B.1.1.1.P.2 Secara teratur (bekerja sama dengan kota/kabupaten sekitar)			12	12	24	24	24	APBD	Dinas Pariwisata
B.1.2.1 Meningkatkan kualitas layanan wisata di Kota Bogor	B.1.2.2.P.1 Peningkatan kuantitas dan kapabilitas SDM bidang pariwisata melalui pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> Akumulasi jumlah penyelenggaraan pelatihan SDM bidang pariwisata per tahun Persentase SDM pariwisata yang disertifikasi 	Peningkatan kualitas pelayanan pariwisata yang berujung pada peningkatan kunjungan Inovasi Wisata Check Point (Reward)	12	12	24	24	24	APBD, swasta/ masya-rakat	Dinas Pariwisata
B.1.3.1 Meningkatkan nilai Kawasan Pusaka dan bangunan cagar budaya	B.1.3.1.P.1 Mengidentifikasi dan legalisasi Kawasan Pusaka dan bangunan cagar budaya	Jumlah penetapan Kawasan Pusaka dan bangunan cagar budaya	Peningkatan kualitas Kawasan Pusaka dan Bangunan cagar Budaya sehingga dapat meningkatkan jumlah kunjungan						APBD	Dinas Pariwisata
	B.1.3.1.P.2 Menyusun panduan arsitektur dan rancang kota serta kajian pemanfaatan ruang dan kegiatan di Kawasan Pusaka dan bangunan cagar budaya			Jumlah panduan arsitektur dan rancang kota serta kajian pemanfaatan ruang dan kegiatan di Kawasan Pusaka dan bangunan cagar budaya						APBD

Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja					Sumber dana	Leading Sector
				2023	2024	2025	2026	2027		
	B.1.3.1.P.3 Melakukan upaya pemeliharaan dan restorasi bangunan cagar budaya dan kawasan Pusaka	Prosentase jumlah bangunan cagar budaya dan kawasan Pusaka yang direstorasi		80%	90%	100%	100%	100%	APBD	Dinas Pariwisata
	B.1.3.1.P.4 Sosialisasi aturan dan Peningkatan peran masyarakat dalam pemeliharaan cagar budaya	Jumlah kegiatan sosialisasi aturan dan Peningkatan peran masyarakat dalam pemeliharaan cagar budaya		12	12	24	24	24	APBD	Dinas Pariwisata
B.1.3.2 Mengembangkan potensi sosial budaya masyarakat yang memiliki nilai sejarah	B.1.3.2.P.1 Identifikasi potensi sosial budaya masyarakat yang memiliki nilai sejarah	Jumlah potensi sosial budaya masyarakat yang memiliki nilai sejarah	Meningkatkan daya Tarik daerah untuk menambah paket wisata daerah						APBD	Dinas Pariwisata
	B.1.3.2.P.2 Mengadakan <i>event – event</i> sosial budaya masyarakat yang memiliki nilai sejarah	Jumlah <i>event – event</i> sosial budaya masyarakat yang memiliki nilai sejarah	Meningkatkan daya Tarik daerah untuk menambah paket wisata daerah	12	12	24	24	24	APBD	Dinas Pariwisata
B.1.4.1 Promosi destinasi wisata secara daring	B.1.4.1.P.1 Pembuatan situs web resmi pariwisata Kota Bogor yang bertautan dengan berbagai platform travel dan wisata, termasuk juga akun resmi pada sosial media berbasis grafis (Facebook, instagram, twitter)	<ul style="list-style-type: none"> • Terbangunnya situs resmi pariwisata Kota Bogor yang terintegrasi (Persentase kemajuan) • Dibuatnya akun resmi pariwisata Kota Bogor pada media sosial yang teritegrasi • Terjalannya kerjasama promosi pariwisata dengan media online (jumlah kerjasama) • Persentase kemajuan penataan destinasi wisata secara bertahap. 	Identitas resmi pariwisata Kota Bogor akan meningkatkan kepercayaan dan keyakinan publik akan tata kelola wisata yang baik	20%	40%	60%	80%	100%	APBD	Dinas Pariwisata

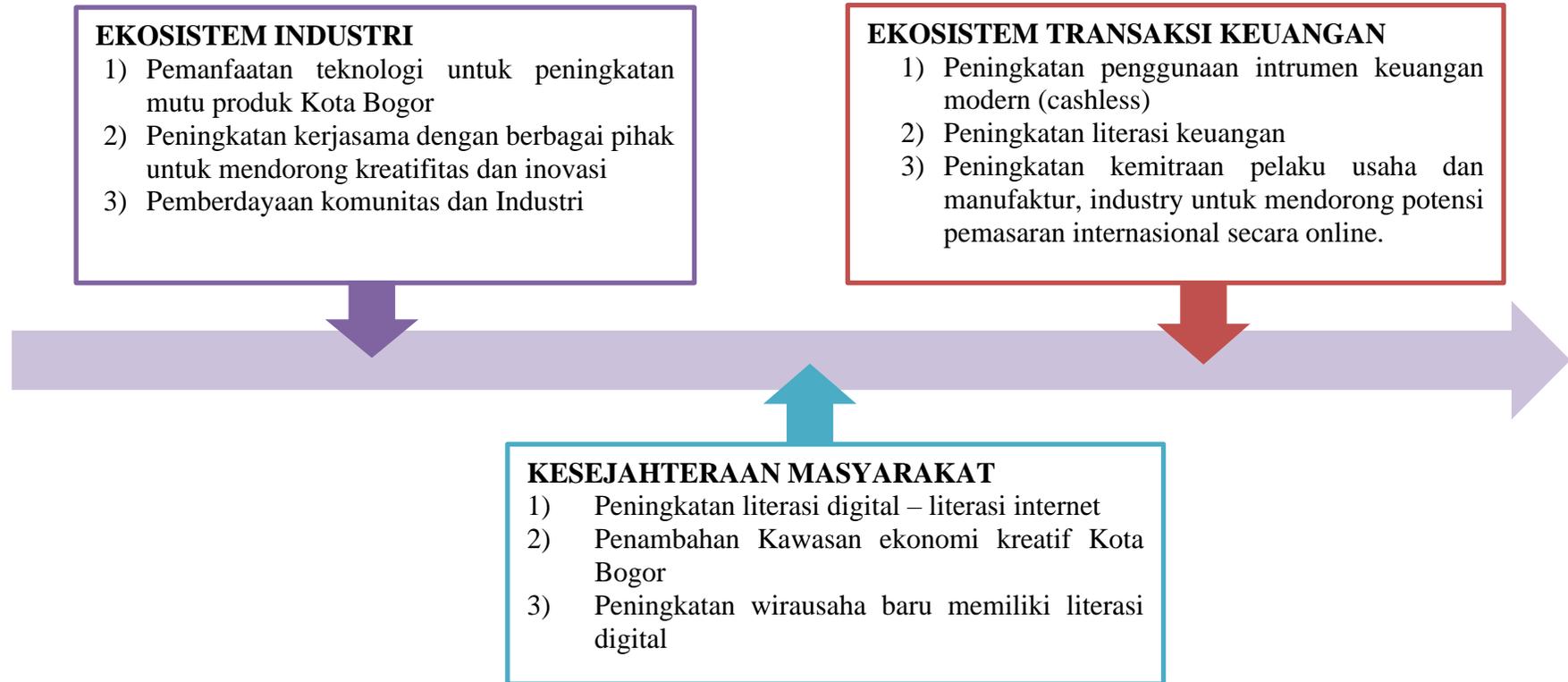
Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja					Sumber dana	Leading Sector
				2023	2024	2025	2026	2027		
	B.1.4.1.P.2 Menjalin kerjasama dengan media dan influencer untuk memasarkan destinasi wisata Kota Bogor	• Jumlah kunjungan wisatawan	Kerjasama dengan media dan influencer yang sudah memiliki basis masa akan memudahkan promosi						APBD	Dinas Pariwisata
	B.1.4.1.P.3 Penataan kawasan wisata bertahap		Meningkatkan daya tarik investor untuk membangun kawasan wisata						APBD	Dinas Pariwisata
B.2.1.1 Penetapan produk khas sebagai ikon daerah	B.2.1.1.P.1 Pendaftaran indikasi geografis dari suatu produk khas atau obyek khas daerah setempat ke Ditjen HaKI,	Akumulasi jumlah item produk indikasi geografis Kota Bogor	Indikasi geografis (produk khas) akan meningkatkan nilai <i>branding</i> Kota Bogor							
B.2.2.1 Pendampingan industri kreatif termasuk UMKM	B.2.2.1.P.1 Inkubasi industri kreatif dari pemerintah: pelatihan pengolahan, peningkatan mutu dan penambahan nilai produk	Akumulasi jumlah program inkubasi & pendampingan industri kreatif per tahun	Meningkatkan gairah wirausaha dan kreativitas masyarakat (QW)	12	12	24	24	24	APBD	Disperin-dagkop
	B.2.2.1.P.2 Permodalan industri kreatif	Akumulasi jumlah industri kreatif yang mendapat program permodalan per tahun	Meningkatkan gairah wirausaha dan kreativitas masyarakat						APBD	Disperin-dagkop
	B.2.2.1.P.3 Promosi dan pemasaran lewat tautan dengan situs web Pemkot Bogor, Prov. Jawa Barat dan Kementerian Pariwisata	Akumulasi jumlah konten promosi industri kreatif & UMKM di situs web Pemkot Bogor, Prov. Jawa Barat dan Kementerian Pariwisata	Meningkatkan jaringan pemasaran dengan link ke beberapa situs sekaligus						APBD	Disperin-dagkop Dinas Pariwisata

Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja					Sumber dana	Leading Sector
				2023	2024	2025	2026	2027		
B.3.1.1 Membangun wajah kota yang lebih modern dan berwawasan <i>Smart City</i>	B.3.1.1.P.1 Pembuatan item-item pendukung kota cerdas (rambu lalu lintas dan penunjuk jalan, penerangan, patok pengaman jalan, titik simpul kota/alun-alun, taman kota)	Terbangunnya taman kota, Digital Signage, penerangan dll (Persentase kecamatan yang telah dilengkapi rambu, penerangan, marka)	Meningkatkan kualitas wajah kota untuk menarik pengunjung dan investor	20%	40%	60%	80%	100%	APBD, CSR	Dinas PUPR Dinas Kominfo Dishub
	B.3.1.1.P.2 Pembuatan <i>landmark</i> kota	Terbangunnya <i>Landmark</i> Kota (Akumulasi jumlah landmark/identitas khas kota)	Identitas kota akan memberikan kesan khusus untuk wisatawan	20%	40%	60%	80%	100%	APBD, CSR	Dinas PUPR Dinas Kominfo Dishub
B.3.1.2 Memberdayakan masyarakat untuk menata kampung dan pemukiman untuk mempercantik kota	B.3.1.2.P.1 Lomba antar kampung untuk memperbaiki wajah kampung secara mandiri	Perbaikan wajah kampung (persentase desa yang tertata rapi)	Penyempurnaan wajah kampung secara mandiri	20%	40%	60%	80%	100%	APBD	Dinas PUPR
B.3.2.1 Memanfaatkan layanan berbasis teknologi untuk meningkatkan branding kota Bogor	B.3.2.1.P.1 Program Kerjasama dengan perusahaan berbasis IT dalam pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan branding kota Bogor	Jumlah Kerjasama dengan perusahaan berbasis IT dalam pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan branding kota Bogor Jumlah masyarakat yang mengakses layanan berbasis IT terkait pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan branding kota Bogor	Meningkatkan gairah wirausaha dan kreativitas masyarakat	12	12	24	24	24	APBD, CSR	Dinas PUPR Dinas Kominfo

4.3. Peta Jalan *Smart Economy*

Peta jalan pembangunan *Smart City* untuk dimensi *Smart Economy* untuk periode jangka pendek dan menengah (1-5 tahun) disajikan dalam tabel berikut:

4.3.1. Peta Jalan *Smart Economy* untuk Jangka Pendek dan Jangka Menengah



Gambar 4. 3 Peta Jalan *Smart Economy* Jangka Pendek dan Jangka Menengah Kota Bogor

Tabel 4. 3 Peta Jalan Dimensi Smart Economy Untuk Jangka Pendek dan Jangka Menengah

Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja					Sumber Dana	Leading Sector
				2023	2024	2025	2026	2027		
Ec.1.1.1 Memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan mutu produk unggulan Kota Bogor	Ec.1.1.1.P.1 Program Kerjasama dengan perusahaan berbasis teknologi dalam meningkatkan mutu produk unggulan Kota Bogor	Jumlah Kerjasama dengan perusahaan berbasis teknologi dalam meningkatkan mutu produk unggulan Kota Bogor	Percepatan Peningkatan mutu produk unggulan Kota Bogor	12	12	24	24	24	APBD	Disperin-dagkop
	Ec.1.1.1.P.2 Program pelatihan pemanfaatan teknologi dalam proses produksi untuk meningkatkan mutu produk unggulan Kota Bogor	Prosentase Peningkatan penjualan produk unggulan Kota Bogor	Percepatan Peningkatan mutu produk unggulan Kota Bogor	20%	40%	60%	80%	100%	APBD	Disperin-dagkop
Ec.1.1.2 Meningkatkan Kerjasama dengan komunitas dalam menciptakan kreatifitas dan inovasi produk unggulan kota Bogor	Ec.1.1.2.P.1 Program Kerjasama pelatihan dengan komunitas dalam menciptakan kreatifitas dan inovasi produk unggulan kota Bogor	Jumlah kerjasama pelatihan dengan komunitas dalam menciptakan kreatifitas dan inovasi produk unggulan kota Bogor	Penyediaan program-program pelatihan UMKM dengan biaya dari pihak eksternal	12	12	24	24	24	APBD	Disperin-dagkop
Ec.1.3.1 Penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pelatihan	Ec.1.3.1.P.1 Kerjasama dengan perguruan tinggi untuk mendirikan politeknik	Terselenggaranya pendidikan politeknik	Percepatan sarana pendidikan untuk mencetak lulusan siap guna	1	1	1	1	1	APBD	Disperin-dagkop Dinas Pendidikan

Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja					Sumber Dana	Leading Sector
				2023	2024	2025	2026	2027		
Ec.1.3.2 Pelibatan industri untuk peningkatan kompetensi masyarakat	Ec.1.3.2.P.1 Kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan industri untuk mendirikan Balai Latihan Kerja dan program pelatihan (bidang industri, pariwisata dan ekonomi kreatif)	Terselenggaranya pelatihan kerja siap pakai di BLK	Percepatan peningkatan keahlian tenaga kerja siap pakai	12	12	24	24	24	APBD	Disperin-dagkop Dinas Ketenagakerjaan
Ec.1.3.3 Pembuatan program-program inkubator untuk UMKM dan pemberdayaan masyarakat sehingga siap masuk ke <i>e-commerce</i>	Ec.1.3.3 P 1 Pelatihan dan pendampingan tentang pemanfaatan TIK untuk bisnis UMKM	Persentase peningkatan UMKM yang didukung TIK	Pengetahuan tentang pemasaran lewat jaringan internet memperluas potensi pemasaran	20%	40%	60%	80%	100%	APBD	Disperin-dagkop
	Ec.1.3.3 P 2 Promosi UMKM dan penyiapan pasar daring bersama yang didukung oleh Pemerintah Daerah.	Tersedianya fasilitas dan wadah pemasaran UMKM secara daring	Pembuatan <i>marketplace</i> lokal untuk UMKM							
Ec.1.4.1 Meningkatkan kerja sama penggunaan dana CSR dari perusahaan-perusahaan besar yang memiliki pasar di Kota Bogor	Ec.1.4.1 P 1 Pembuatan program kerjasama CSR dari perusahaan besar di Bogor untuk memajukan UMKM	MoU dengan perusahaan besar	Penyediaan program-program pelatihan UMKM dengan biaya dari pihak eksternal	12	12	24	24	24	APBD	Disperin-dagkop

Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja					Sumber Dana	Leading Sector
				2023	2024	2025	2026	2027		
Ec.2.1.1 Meningkatkan literasi penggunaan Internet dengan bijak	Ec.2.1.1.P.1 Program Pelatihan literasi digital bekerjasama dengan kominfo, perguruan tinggi dan komunitas	Prosentase Peningkatan tingkat literasi digital masyarakat	Percepatan Peningkatan tingkat literasi digital masyarakat	20%	40%	60%	80%	100%	APBD	Dinas Pendidikan Dinas Kominfo
	Ec.2.1.1.P.2 Program Peningkatan <i>awareness</i> tentang penggunaan internet dengan bijak								APBD	Dinas Pendidikan
Ec.2.2.1 Mendirikan pusat-pusat Kawasan Ekonomi Kreatif sebagai destinasi wisata belanja baru	Ec.2.2.1.P.1 Kerjasama dengan pihak swasta dalam mendirikan pusat-pusat Kawasan Ekonomi Kreatif sebagai destinasi wisata belanja baru	Peningkatan jumlah pusat-pusat Kawasan Ekonomi Kreatif sebagai destinasi wisata belanja baru	Peningkatan ekonomi masyarakat melalui penambahan pusat Kawasan Ekonomi Kreatif						APBD	Disperin-dagkop
Ec.2.3.1 Peningkatan program sosialisasi terkait ketahanan usaha bagi wirausaha baru dan menengah.	Ec.2.3.1.P.1 program sosialisasi terkait ketahanan usaha bagi wirausaha baru dan menengah.	Prosentase peningkatan usaha terdaftar yang dapat bertahan dalam kurun waktu 2 tahun.	Peningkatan ketahanan usaha bagi wirausaha baru dan menengah.	20%	40%	60%	80%	100%	APBD	Disperin-dagkop
Ec.2.3.2 Mendirikan serta memanfaatkan Kerjasama inkubator bisnis dalam usaha meningkatkan ketahanan usaha bagi wirausaha baru dan menengah.	Ec.2.3.2.P.1 Program pendirian inkubator bisnis	Jumlah inkubator bisnis							APBD	Disperin-dagkop
	Ec.2.3.2.P.2 Program Kerjasama inkubator bisnis dengan perguruan tinggi atau komunitas bisnis dalam usaha meningkatkan	Kerjasama inkubator bisnis dengan perguruan tinggi atau komunitas bisnis dalam usaha meningkatkan ketahanan usaha bagi wirausaha baru dan menengah.	Peningkatan ketahanan usaha bagi wirausaha baru dan menengah.	12	12	24	24	24	24	APBD

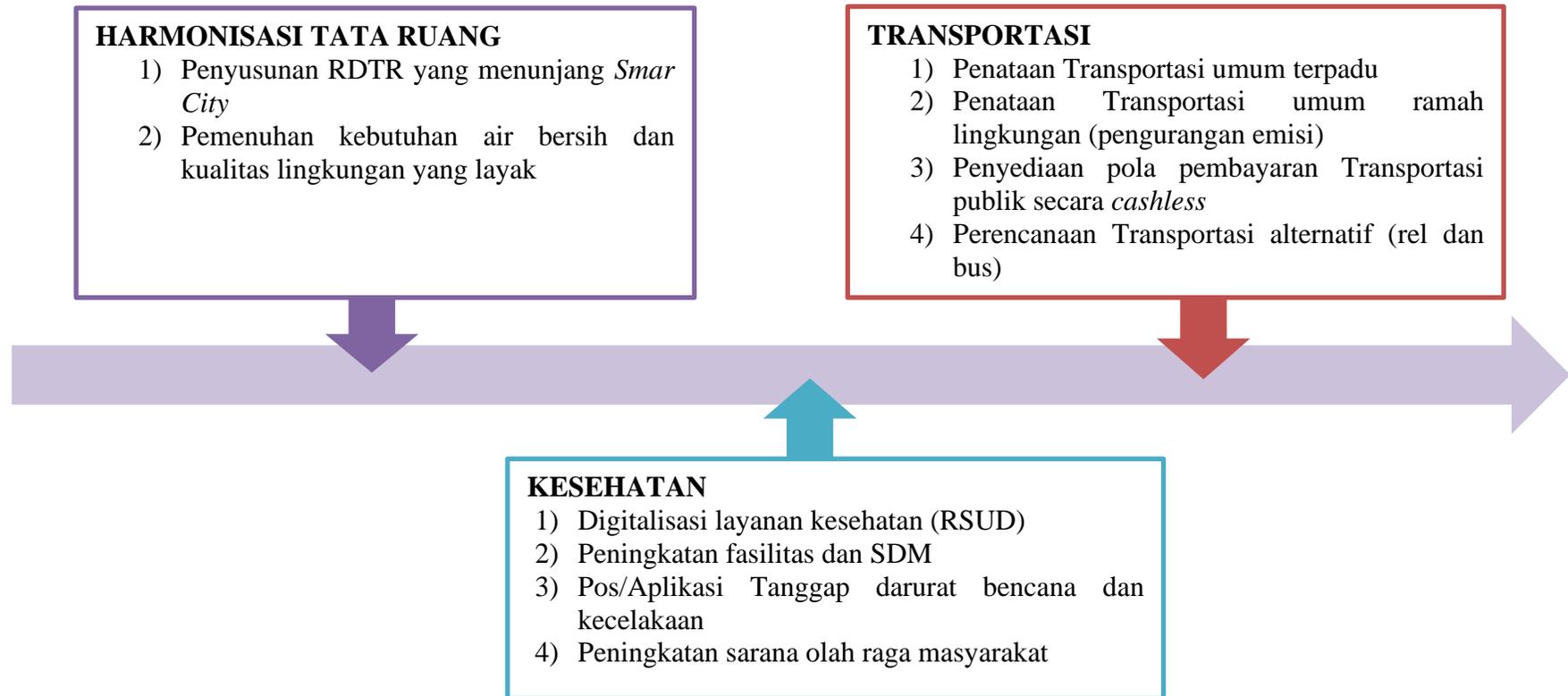
Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja					Sumber Dana	Leading Sector
				2023	2024	2025	2026	2027		
	ketahanan usaha bagi wirausaha baru dan menengah.									
Ec.2.4.1 Meningkatkan <i>awareness</i> masyarakat terkait bisnis digital dan persaingan yang sehat	Ec.2.4.1.P.1 Program Peningkatan <i>awareness</i> masyarakat terkait bisnis digital dan persaingan yang sehat melalui media sosial, perusahaan dan lainnya.	Peningkatan bisnis UMKM lokal berbasis digital		20%	40%	60%	80%	100%	APBD	Disperin-dagkop
Ec.3.1.1 Peningkatan kesadaran masyarakat untuk menggunakan instrumen keuangan modern	Ec.3.1.1.P.1 Penyusunan program-program sinergi perbankan dengan UMKM Ec.3.1.1.P.2 Sosialisasi literasi keuangan sehingga dapat memanfaatkan fleksibilitas <i>cashless economy</i>	Jumlah kerjasama perbankan dengan UMKM (akumulasi jumlah) Persentase peningkatan penggunaan metoda <i>cashless</i>	Memajukan UMKM Efisiensi proses pembayaran dan peningkatan keamanan	12 20%	12 40%	24 60%	24 80%	24 100%	APBD	Disperin-dagkop
Ec.3.2.1 Meningkatkan literasi keuangan masyarakat	Ec.3.2.1.P.1 Kerjasama dengan perguruan tinggi dalam sosialisasi peningkatan literasi keuangan masyarakat melalui program pengabdian kepada masyarakat	Peningkatan tingkat literasi keuangan masyarakat	Percepatan Peningkatan literasi keuangan masyarakat	20%	40%	60%	80%	100%	APBD	Disperin-dagkop
Ec.3.3.1 Penguatan Kerjasama antara pelaku usaha dengan manufaktur dan aksesibilitas ke pasar internasional	Ec.3.3.1.P.1 Program Kemitraan antara pelaku usaha dengan manufaktur aksesibilitas ke pasar internasional dengan pemanfaatan e-	Jumlah kemitraan antara pelaku usaha dengan manufaktur aksesibilitas ke pasar internasional dengan pemanfaatan e-	Pengetahuan tentang pemasaran lewat jaringan internet memperluas potensi pemasaran	12	12	24	24	24	APBD	Disperin-dagkop

Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja					Sumber Dana	Leading Sector
				2023	2024	2025	2026	2027		
dengan pemanfaatan <i>e-commerce</i> dan <i>marketplace</i> .	<i>commerce</i> dan <i>marketplace</i> .									

4.4. Peta Jalan *Smart Living*

Peta jalan pembangunan *Smart City* untuk dimensi *Smart Living* untuk periode jangka pendek dan menengah (1-5 tahun) disajikan dalam tabel berikut:

4.4.1. Peta Jalan *Smart Living* untuk Jangka Pendek dan Jangka Menengah



Gambar 4. 4 Peta Jalan *Smart Living* Jangka Pendek dan Jangka Menengah Kota Bogor

Tabel 4. 4 Peta Jalan Dimensi Smart Living Untuk Jangka Pendek dan Jangka Menengah

Sub-Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja					Sumber Dana	Leading Sector
					2023	2024	2025	2026	2027		
Lv.1. HARMONISASI TATA RUANG	Lv.1.1.1 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang mendukung 6 dimensi <i>Smart City</i> sebagai turunan dari Perda RTRW terbaru	Lv.1.1.1.P.1 Penyusunan RDTR yang mendukung 6 dimensi <i>Smart City</i>	Persentase kemajuan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang	Amanat UU Penataan Ruang yang dapat diselaraskan dengan konsep <i>Smart City</i>	100%					APBD	Bappeda
		Lv.1.1.1.P.2 Sosialisasi Rencana Induk <i>Smart City</i> kepada setiap OPD dan masyarakat sabagai dasar pembangunan kota cerdas terpadu	Umpan balik penerapan rencana induk dari setiap dinas terkait	Meningkatan akurasi pembangunan kota terhadap rencana	100%	100%	100%	100%		APBD	Bappeda
	Lv.1.2.1 Program peningkatan fasilitas umum untuk masyarakat	Lv.1.2.1.P.1 Alokasi kawasan untuk pasar, terminal, SPBU dan sekolah	Ketersediaan jumlah lahan untuk rencana pembangunan fasilitas umum sesuai RTRW/RDTR	Pemenuhan fasilitas umum bagi masyarakat	20%	25%	30%	35%		APBD	Dinas PUPR, Bappeda
		Lv.1.2.1.P.2 Pengurangan luasan kawasan kumuh	Persentase luas kawasan kumuh		1,95%	1,77%	1,59%	1,41%		APBD	Dinas PUPR
	Lv.1.2.2 Pemenuhan kebutuhan air bersih	Lv.1.2.2.P.1 Perluasan jaringan PDAM	Persentase luas daerah jaringan PDAM dibandingkan perencanaan	Peningkatan layanan dan kualitas kesehatan masyarakat	100%	100%	100%	100%		Pihak ketiga / BUMD	PDAM
		Lv.1.2.2.P.2 Pembayaran iuran air bersih secara <i>online/cashless</i>	Terimplementasinya pembayaran iuran air bersih secara <i>online/cashless</i> (persentase kemajuan pengembangan program)	Peningkatan efisiensi sistem pembayaran iuran air bersih dan Peningkatan keamanan pembayaran	90%	100%				CSR	PDAM

Sub-Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja					Sumber Dana	Leading Sector
					2023	2024	2025	2026	2027		
	Lv.1.3.1 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang layak	Lv.1.3.1.P.1 Program Peningkatan kualitas air bersih	Peningkatan jumlah debit air bersih	Peningkatan layanan dan kualitas kesehatan masyarakat	20%	25%	30%	35%		Pihak ketiga (CSR, BUMD)	PDAM
		Lv.1.3.1.P.2 Program akses ke air bersih	Prosentase kepala keluarga yang terlayani air bersih	Peningkatan layanan dan kualitas kesehatan masyarakat	67,38%	70,42%	73,46%	76,5%		Pihak ketiga (CSR, BUMD)	PDAM
		Lv.1.3.1.P.3 Program layanan penampungan air limbah rumah tangga	Prosentase kepala keluarga yang terlayani penampungan air limbah rumah tangga	Peningkatan layanan dan kualitas kesehatan masyarakat	7,88%	8,55%	9,22%	9,89%		BUMD, CSR	PDAM, Dinas Perkim
Lv.2. KESEHATAN	Lv.2.1.1 Peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas kesehatan	Lv.2.1.1.P.1 Penambahan RSUD dan Puskesmas	Rasio fasilitas kesehatan terhadap penduduk	Pemerataan fasilitas kesehatan						APBD, Swasta	Dinkes
		Lv.2.1.1.P.2 Implementasi Sistem Informasi Manajemen RSUD	<ul style="list-style-type: none"> Persentase kemajuan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit terpadu Pendaftaran calon pasien RSUD secara <i>online</i> 	Digitalisasi layanan di RSUD	80%	80%	100%			APBD, CSR	Dinkes
		Lv.2.1.1.P.3 Layanan <i>telemedicine</i> untuk dokter spesialis	Persentase kemajuan pengembangan layanan <i>telemedicine</i>	Pemerataan layanan medis, mengantisipasi keterbatasan dokter spesialis	90%	100%				APBD, CSR	Dinkes
	Lv.2.1.2 Peningkatan jumlah tenaga Kesehatan sesuai dengan kualifikasi dan	Lv.2.1.2.P.1 Beasiswa ikatan dinas untuk mahasiswa kedokteran atau residen	Rasio dokter per penduduk (dokter umum, spesialis dan dokter gigi)	Peningkatan kuantitas SDM kesehatan						APBD, CSR, Perguruan tinggi	Dinkes

Sub-Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja					Sumber Dana	Leading Sector
					2023	2024	2025	2026	2027		
	kompetensi yang dibutuhkan	program spesialis yang dibutuhkan									
		Lv.2.1.2.P.2 Pelatihan dan penyiapan uji kompetensi bagi tenaga kesehatan	Persentase tenaga kesehatan lulus uji kompetensi	Peningkatan kuantitas SDM kesehatan	80%	85%	90%	95%		APBD, Swasta	Dinkes
	Lv.2.1.3 Layanan kegawatdaruratan pada bencana	Lv.2.1.3.P.1 Pembuatan <i>Public Service Center</i> untuk tanggap darurat bencana	Kemajuan Terbangunnya <i>Public Service Center</i> untuk tanggap darurat bencana secara bertahap	Pos tanggap darurat untuk antisipasi berbagai jenis potensi bencana	80%	90%	100%			APBD, CSR	Dinkes, BPBD
	Lv.2.2.1 Puskesmas harus menjadi pusat informasi penyuluhan kesehatan bagi masyarakat	Lv.2.2.1.P.1 Pembuatan program penyuluhan berkala tentang kesehatan lingkungan dan peningkatan gizi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran) Angka Stunting 	Peningkatan unsur Indeks Pembangunan Manusia						APBD, CSR	Dinkes, DPPPA
		Lv.2.2.1.P.2 Pembuatan program penyuluhan berencana keluarga	Angka akseptor KB dari pasangan usia subur	Peningkatan unsur Indeks Pembangunan Manusia						APBD, CSR	DPPKBBD
	Lv.2.3.1 Penyediaan sarana olah raga gratis bagi masyarakat	Lv.2.3.1.P.1 Kerjasama dengan perusahaan dalam penyediaan sarana olah raga gratis bagi masyarakat	Jumlah sarana olah raga yang dapat diakses oleh masyarakat secara gratis	Peningkatan Kesehatan masyarakat						APBD, Swasta	Dispora
Lv.3. TRANSPORTASI	Lv.3.1.1 Penataan layanan transportasi umum terpadu	Lv.3.1.1.P.1 Penataan transportasi umum terpadu sebagai bagian dari layanan transportasi Jabodetabek	Persentase perkembangan penataan transportasi umum dibandingkan dengan rencana	Pemenuhan kebutuhan masyarakat akan akses ke seluruh daerah di Kota Bogor	70%	75%	80%	85%		APBD, BUMD	Dishub

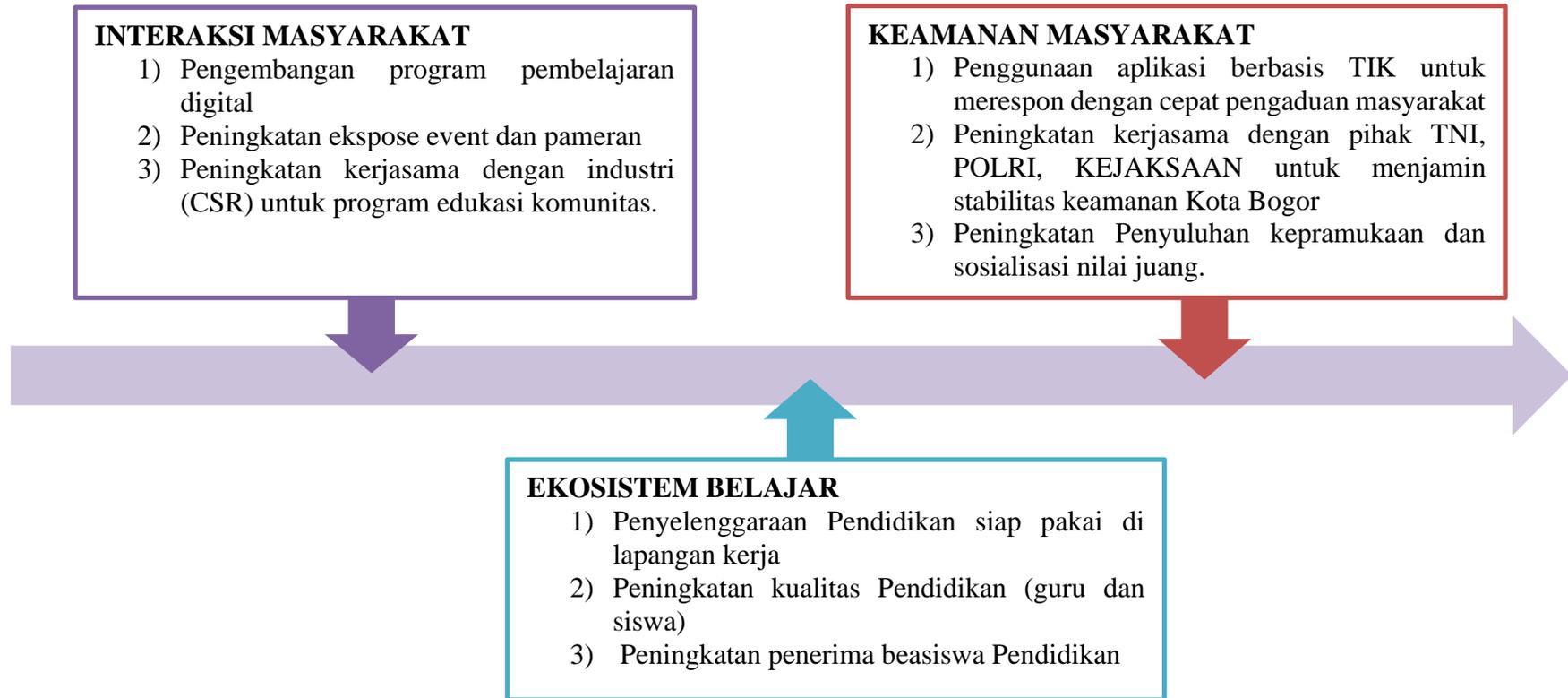
Sub-Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja					Sumber Dana	Leading Sector
					2023	2024	2025	2026	2027		
		Lv.3.1.1.P.2 Penambahan akses rute jalan dan sarana/trayek transportasi umum menuju ruang publik dan Kawasan pemukiman.	Jumlah akses rute jalan/trayek transportasi umum (Bis).	Pemenuhan kebutuhan masyarakat akan akses ke seluruh daerah di kota Bogor	20%	25%	30%	35%		APBD, BUMD	Dishub, BUMD
	Lv.3.2.1 Penataan sarana dan prasarana transportasi publik ramah lingkungan	Lv.3.2.1.P.1 Penataan sarana dan prasarana transportasi publik dengan energi ramah lingkungan	Persentase transportasi umum ramah lingkungan	Pengurangan tingkat emisi gas.	20%	25%	30%	35%		APBD, CSR, BUMD	Dishub, BUMD
		Lv.3.2.1.P.2 Penyediaan fasilitas pembayaran transportasi publik secara <i>cashless</i> .	Persentase transportasi umum ramah yang dapat dibayar secara <i>cashless</i>	Peningkatan efisiensi sistem pembayaran transportasi umum dan Peningkatan keamanan pembayaran	20%	25%	30%	35%		APBD, CSR, BUMD	Dishub
	Lv.3.2.2 Penyediaan sarana transportasi alternatif	Lv.3.2.2.P.1 Penyediaan sarana transportasi berbasis rel dan <i>skywalk</i>	Persentase penambahan sarana transportasi dibandingkan dengan rencana	Peningkatan efisiensi waktu tempuh	20%	25%	30%	35%		APBD, CSR, BUMD	Dishub, PUPR, BUMD
	Lv.3.2.3 Pengontrolan terhadap kelaikjalanan sarana transportasi	Lv.3.2.3.P.1 Peningkatan layanan pada aplikasi KIR berbasis TIK	Kemajuan implementasi layanan KIR secara daring	Peningkatan keamanan penggunaan transportasi publik	80%	90%	100%			APBD	Dishub

Sub-Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja					Sumber Dana	Leading Sector
					2023	2024	2025	2026	2027		
		Lv.3.2.3.P.2 Peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang lolos emisi gas buang	Persentase kendaraan bermotor yang lolos emisi gas buang	Pengurangan tingkat emisi gas.	90%	95%	100%				

4.5. Peta Jalan *Smart Society*

Peta jalan pembangunan *Smart City* untuk dimensi *Smart Society* untuk periode jangka pendek dan menengah (1-5 tahun) disajikan dalam tabel berikut:

4.5.1. Peta Jalan *Smart Society* untuk Jangka Pendek dan Jangka Menengah



Gambar 4. 5 Peta Jalan *Smart Society* Jangka Pendek dan Menengah Kota Bogor

Tabel 4. 5 Peta Jalan Dimensi Smart Society Untuk Jangka Pendek dan Jangka Menengah

Sub-Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja					Sumber Dana	Leading Sector
					2023	2024	2025	2026	2027		
S.1. INTERAKSI MASYARAKAT	S.1.1.1 Meningkatkan aktivitas dan komunikasi masyarakat dalam kolaborasi positif	S.1.1.1.P.1 Pengembangan program (aplikasi dan konten digital) pemberdayaan komunitas (Rumah Baca, Kursus Keterampilan, Adat, Seni Budaya, dsb.)	Jumlah inovasi yang dihasilkan oleh komunitas	Sarana pembelajaran digital bagi berbagai komunitas lokal	1	2	3	4	5	CSR, Swasta, Masyarakat	Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Kominfo
		S.1.1.1.P.2 Event ekspose & pameran yang menampilkan inovasi lokal dari komunitas agar dapat perhatian dan dikembangkan oleh investor atau pelaku usaha	Peserta <i>event</i> ekspose dan pameran	Menumbuhkan gairah wirausaha intra komunitas							CSR, APBD
	S.1.1.2 Kerjasama dengan perusahaan/ industri yang memiliki dana CSR	S.1.1.2.P.1 Mengarahkan dana CSR kepada program-program edukasi komunitas (perpustakaan, forum-forum edukasi) serta beasiswa.	Akumulasi jumlah program edukasi komunitas yang dibiayai anggaran CSR perusahaan	Peningkatan fasilitas publik tanpa penggunaan APBD	6	7	8	9	10	CSR	Dinas Pendidikan, Dinas Perindustrian
		S.1.1.2.P.2 Mengarahkan dana CSR untuk pembangunan fasilitas kota bagi masyarakat berkebutuhan khusus	Jumlah implementasi program fasilitas kota bagi masyarakat berkebutuhan khusus	Pemerataan fasilitas kota untuk seluruh lapisan masyarakat	1	2	3	4	5	CSR	
	S.1.2.1	S.1.2.1.P.1 Meningkatkan peran serta kepemudaan dalam kegiatan pemuda pelopor, pemuda wirausaha, pertukaran pemuda antar negara, jambore pemuda dan jambore komunitas	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kepeloporan, Kewirausahaan, Jambore Pemuda dan Jambore Komunitas	Meningkatkan gairah kewirausahaan pemuda	40%	42%	44%	46%	58%	APBD, CSR	

Sub-Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja					Sumber Dana	Leading Sector
					2023	2024	2025	2026	2027		
	S.1.3.1 Mengembangkan metodologi <i>e-learning</i> bagi siswa SD, SMP dan SMA atau sederajat	S.1.3.1.P.1 Program pengembangan metodologi <i>e-learning</i> terutama <i>digital ethics</i> dan <i>digital security</i> bagi siswa SD, SMP dan SMA atau sederajat.	Persentase Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar dan Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas yang Menyelenggarakan <i>e-learning</i>	Meningkatkan <i>awareness</i> literasi digital siswa sekolah dasar dan menengah	20%	25%	30%	35%	40%	Swasta, Perguruan Tinggi, CSR, APBD	Diskominfo, Dinas Pendidikan
	S.1.3.2 Mengkampanyekan peningkatan kesadaran pemanfaatan gawai dan internet secara positif dan produktif serta cara bersosial media secara cerdas, sehat, dan anti diskriminasi sara.	S.1.3.2.P.1 Program Kerjasama Antara Pemerintah Daerah Dengan Stakeholders Relawan TIK terkait kampanye kesadaran pemanfaatan gawai dan internet serta cara bersosial media secara cerdas, sehat, dan anti diskriminasi sara.	Jumlah Kegiatan Bersama Antara Pemerintah Daerah Dengan Stakeholders Relawan TIK.	Meningkatkan literasi digital masyarakat terkait <i>awareness</i> dalam penggunaan media digital.						Perguruan Tinggi, CSR, APBD	Diskominfo
S2. EKOSISTEM BELAJAR/ PENDIDIKAN	S.2.1.1 Penyelenggaraan pendidikan siap pakai	S.2.1.1.P.1 Pembuatan pendidikan vokasi (SMK & Politeknik) di bidang yang berpotensi membangun daerah (pariwisata, kesehatan, dll)	Jumlah pendidikan vokasi (SMK dan Perguruan Tinggi Vokasi atau Politeknik)	Percepatan penyediaan tenaga kerja terampil siap pakai	1	1	2	2	3	Swasta, APBD	Dinas Pendidikan
		S.2.1.1.P.2 Penyediaan lapangan pekerjaan untuk penerima beasiswa	Peningkatan persentase penyerapan tenaga kerja untuk penerima beasiswa	Penurunan angka pengangguran		80%	85%	90%	95%	APBD, Swasta	BKPSDM, Dinas Tenaga kerja
		S.2.1.2.P.1 Penyediaan beasiswa S2 untuk ASN	Alokasi anggaran beasiswa S2 untuk ASN	Peningkatan kualitas ASN						APBD, CSR	BKPSDM

Sub-Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja					Sumber Dana	Leading Sector
					2023	2024	2025	2026	2027		
	S.2.1.2 Peningkatan kualitas pendidikan SDM		ASN (jumlah penerima beasiswa)								
		S.2.1.2.P.2 Penyediaan beasiswa tenaga pendidik ke jenjang S1	Alokasi anggaran beasiswa tenaga pendidik ke jenjang S1 (persentase pendidik yang menerima beasiswa pendidikan S1)	Peningkatan kualitas tenaga pengajar	20%	20%	20%	20%	20%	APBD, CSR	BKPSDM, Dinas Pendidikan
	S.2.2.1 Peningkatan sarana pendidikan <i>online</i>	S.2.2.1.P.1 Perbaikan akses infrastruktur digital dan perangkat pendukungnya (komputer) di sekolah-sekolah untuk peningkatan kualitas pendidikan	Persentase sekolah (SD & SMP) yang didukung jaringan internet dan pendukung TIK yang memadai	Peningkatan kualitas pendidikan dasar dan menengah	100%	100%	100%	100%	100%	APBD, CSR	Diskominfo
	S.2.2.2 Peningkatan minat baca dan kualitas literasi peserta didik	S.2.2.2.P.1 Pengoperasian perpustakaan keliling	Tersedianya perpustakaan keliling di lokasi-lokasi berkumpulnya anak-anak usia sekolah	Pemerataan Perpustakaan Keliling di setiap Kecamatan	35%	40%	45%	50%	55%	APBD, CSR	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	S.2.3.1 Kerjasama dengan perusahaan/ industri yang memiliki dana CSR	S.2.3.1.P.1 Mengarahkan dana CSR kepada program-program Peningkatan akses infrastruktur digital di sekolah-sekolah untuk peningkatan kompetensi siswa.	Akumulasi jumlah program akses infrastruktur digital di sekolah-sekolah untuk peningkatan kompetensi siswa yang dibiayai anggaran CSR perusahaan.	Peningkatan akses terhadap infrastruktur digital	1	1	2	2	3	CSR	Diskominfo

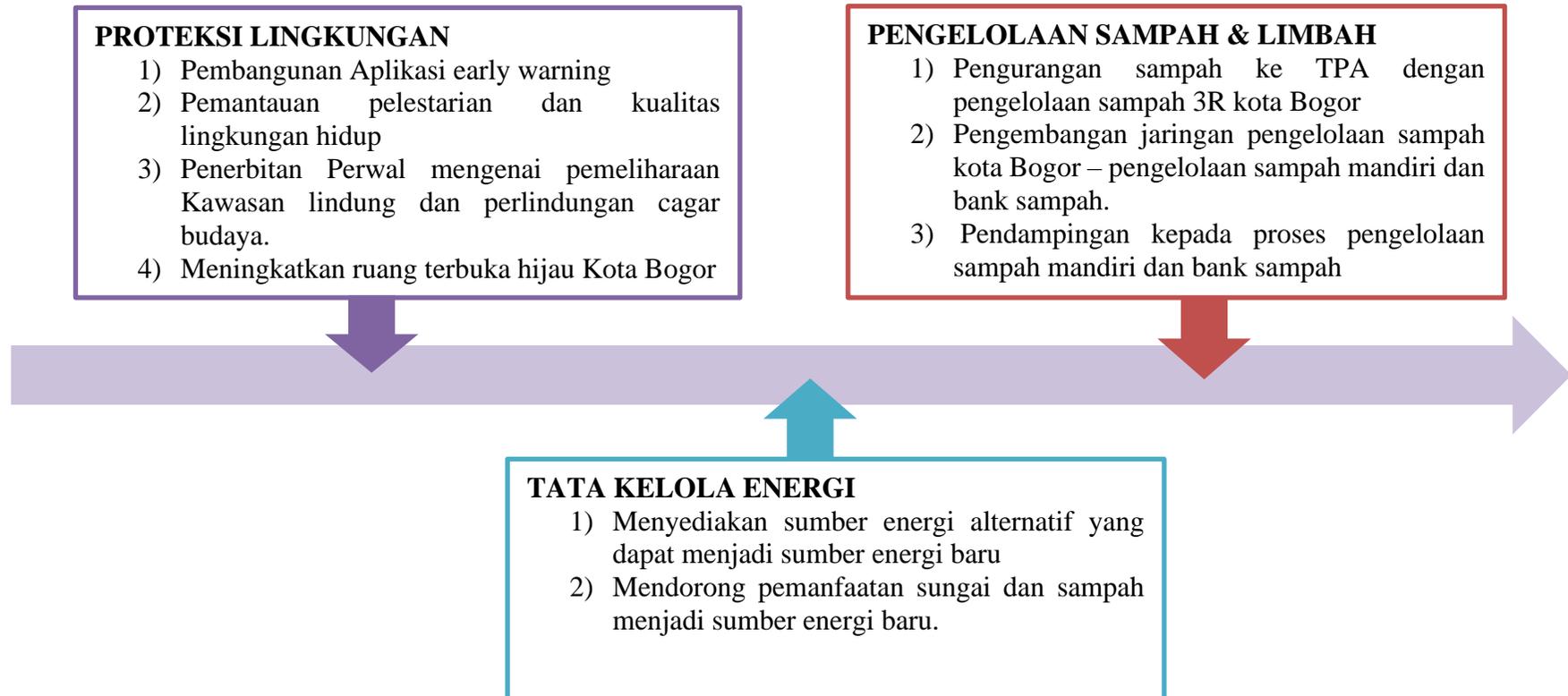
Sub-Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja					Sumber Dana	Leading Sector
					2023	2024	2025	2026	2027		
	S.2.4.1 Kerjasama dengan perusahaan/ industri yang memiliki dana CSR	S.2.4.1.P.1 Mengarahkan dana CSR kepada program-program beasiswa.	Akumulasi jumlah program beasiswa yang dibiayai anggaran CSR perusahaan	Peningkatan kualitas masyarakat yang kurang mampu dalam mengakses pendidikan	20	40	60	80	100	CSR	Dinas perindustrian, BKPSDM
S.3. KEAMANAN MASYARAKAT	S.3.1.1 Peningkatan kualitas keamanan dan ketentraman masyarakat	S.3.1.1.P.1 Pengembangan sistem keamanan terpadu yang didukung TIK secara bertahap (kamera pengamat pada lokasi rawan, sistem pengaduan, sistem peringatan dini keamanan)	Persentase wilayah kota yang dilayani sistem keamanan terpadu	Penggunaan TIK untuk keamanan dan ketentraman masyarakat						APBD, CSR	Diskominfo
		S.3.1.1.P.2 Pengembangan program penyuluhan untuk perlindungan perempuan dan anak	Tersedianya program dan anggaran untuk perlindungan perempuan dan anak (persentase kecamatan yang terlayani program penyuluhan)	Peningkatan keamanan dan ketentraman masyarakat	80%	90%	100%	100%	100%		Dinas P3A
	S.3.3.1 Peningkatan Kerjasama dengan TNI, POLRI, dan Kejaksaan di bidang stabilitas keamanan.	S.3.3.1.P.1 Program Kerjasama dengan TNI, POLRI, dan Kejaksaan di bidang stabilitas keamanan seperti Peningkatan sinergitas tiga pilar desa (Petinggi, Babinsa, Bhabinkamtibmas) melalui penyuluhan tentang bela negara cinta tanah air kesadaran berbangsa dan bernegara, terlibat dalam pembinaan kepramukaan dan	Jumlah kegiatan di bidang stabilitas keamanan seperti penyuluhan dan partisipasi dalam pembinaan kepramukaan dan sosialiasi nilai kejuangan.	Peningkatan keamanan dan ketentraman masyarakat	3	4	5	6	7		Polres, Satpol PP, Badan Kesbangpol

Sub-Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja					Sumber Dana	Leading Sector
					2023	2024	2025	2026	2027		
		mensosialisasikan pentingnya nilai-nilai kejuangan.									

4.6. Peta Jalan *Smart Environment*

Peta jalan pembangunan *Smart City* untuk dimensi *Smart Environment* periode jangka pendek dan menengah (1-5 tahun) disajikan dalam tabel berikut:

4.6.1. Peta Jalan *Smart Environment* untuk Jangka Pendek dan Jangka Menengah



Gambar 4. 6 Peta Jalan *Smart Environment* Jangka Pendek dan Jangka Menengah Kota Bogor

Tabel 4. 6 Peta Jalan Dimensi Smart Environment Untuk Jangka Pendek dan Jangka Menengah

Sub-Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja					Sumber Dana	Leading Sector
					2023	2024	2025	2026	2027		
En.1. PROTEKSI LINGKUNGAN	En.1.1.1 Pemantauan kualitas lingkungan hidup	En.1.1.1.P.1 Pembangunan sistem pemantauan kualitas udara dan air	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah stasiun peman-tauan udara per km2 Jumlah stasiun pemantauan kualitas air per 100.000 penduduk 	Early warning untuk pelestarian lingkungan hidup	1	1	2	3	4	APBD	Dinas Lingkungan hidup
	En.1.1.2 Penyediaan fasilitas mitigasi bencana	En.1.1.2.P.1 Penyediaan/perbaikan sistem peringatan dini bencana banjir	Tersedianya sistem peringatan dini banjir	Early warning untuk mitigasi bencana banjir	1	2	4	6	8	APBD	BPBD Dinas Lingkungan hidup
	En.1.2.1 Penyediaan kebijakan & regulasi tentang lingkungan	En.1.2.1.P.1 Mengalokasikan fungsi Kawasan Lindung pemanfaatan jaringan jalan sebagai sarana penghijauan dan mengatur kepadatan bangunan	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan dan perlindungan Kawasan lindung Jumlah sarana penghijauan di jaringan jalan Persentase kepadatan bangunan di Kota Bogor 	Peningkatan kualitas lahan untuk pelestarian lingkungan	20%	35%	50%	65%	80%	APBD	BPBD Dinas Lingkungan hidup
En.2 PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH	En.2.1.1 Mendorong pengelolaan sampah mandiri (“bank sampah” dsb) untuk mengurangi sampah rumah tangga yang harus dikelola pemerintah kota	En.2.1.1.P.1 Penyediaan fasilitas dan Sosialisasi penanganan mandiri sampah organik	<ul style="list-style-type: none"> Persentase sampah anorganik yang didaur ulang Persentase keluarga yang aktif dalam program bank sampah 	Efisiensi penanganan sampah	20%	35%	50%	65%	80%	APBD	Dinas Lingkungan hidup
		En.2.1.1.P.2 Pembuatan & sosialisasi program bank sampah		Peningkatan manfaat ekonomis dari sampah	20%	35%	50%	65%	80%	APBD	Dinas Lingkungan hidup
	En.2.2.1	En.2.2.1.P.1 Program Pendampingan kepada masyarakat dalam pengelolaan secara teknis,	Adanya lembaga kelompok masyarakat sebagai organisasi pengelola yang tidak	Peningkatan manfaat ekonomis dari sampah						APBD	Dinas Lingkungan Hidup

Sub-Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja					Sumber Dana	Leading Sector
					2023	2024	2025	2026	2027		
	Mengadakan Pendampingan kepada masyarakat dalam pengelolaan secara teknis, kelembagaan dan pendanaan	kelembagaan dan pendanaan	formal namun terlegalisir serta sesuai dengan aspirasi masyarakat. Jumlah Program pendampingan kepada masyarakat dalam pengelolaan secara teknis, kelembagaan dan pendanaan								
	En.2.2.2 Meningkatkan sarana dan sarana, legalitas kelembagaan dan teknis pengelolaan persampahan.	En.2.2.2.P.1 Program peningkatan sarana dan sarana, legalitas kelembagaan dan teknis pengelolaan persampahan.	Luasan pelayanan TPST skala RW (200 rumah) Adanya peraturan setingkat kelurahan untuk pelaksanaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Prosentase dana untuk operasional pengelolaan maupun biaya pemeliharaan atau investasi penambahan prasarana dan sesuai dengan kebutuhan.	Peningkatan efisiensi penanganan sampah						APBD	Dinas Lingkungan Hidup
	En.2.2.3 Pengembangan tempat pengolahan sampah melalui pengomposan dan daur ulang sampah anorganik.	En.2.2.3.P.1 Program pengomposan dan daur ulang sampah anorganik.	Volume sampah terangkut ke TPA	Daur Ulang Sampah Anorganik						APBD	Dinas Lingkungan Hidup

Sub-Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja					Sumber Dana	Leading Sector
					2023	2024	2025	2026	2027		
	En.2.2.4 Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan ibu-ibu rumah tangga dalam pengelolaan sampah.	En.2.2.4.P.1 Program sosialisasi reduksi sampah rumah tangga	Persentase Reduksi Sampah Rumah Tangga	Mengurangi sampah rumah tangga	20%	30%	40%	50%	60%	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
	En.2.3.1 Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penanganan sampah	En.2.3.1.P.1 Program sosialisasi masyarakat dalam penanganan sampah	Jumlah Program sosialisasi kesadaran masyarakat dalam penanganan sampah	Mengurangi volume sampah dan meningkatkan nilai ekonomis sampah	12	12	12	12	12	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
En.3. TATA KELOLA ENERGI	En.3.1.1 Pembangkitan listrik dari energi terbarukan	En.3.1.1.P.1 Implementasi pembangkit listrik tenaga surya	Persentase peningkatan daya listrik yang dihasilkan (kVA)	Penyediaan sumber energi alternatif baru terbarukan	3%	5%	10%	15%	20%	APBD	Dinas PUPR Dinas Lingkungan Hidup
		En.3.1.1.P.2 Implementasi pembangkit listrik mikrohidro	Persentase peningkatan daya listrik yang dihasilkan (kVA)		3%	5%	10%	15%	20%	APBD	Dinas PUPR Dinas Lingkungan Hidup
		En.3.1.1.P.3 Perbaikan Penerangan Jalan Umum bertenaga surya	Persentase penerangan jalan yang beroperasi dengan baik menggunakan sistem manajemen kinerja cahaya/lampu dan tenaga surya		20%	40%	60%	80%	100%	APBD CSR	Dinas PUPR
	En.3.1.2 Kerjasama penyediaan	En.3.1.2.P.1 Pengembangan pembangkitan listrik dari energi terbarukan baik	Kemajuan pengembangan program		25%	40%	60%	80%	100%	APBD Swasta	Dinas Perindustrian dan Energi

Sub-Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja					Sumber Dana	Leading Sector
					2023	2024	2025	2026	2027		
	listrik on-grid dengan pihak swasta	dari APBD maupun pihak ketiga (<i>on grid</i> dan <i>off grid</i>)									
	En.3.2.1 Mendorong pemanfaatan tenaga aliran sungai sebagai sumber tenaga listrik skala kecil bagi rumah tangga	En.3.2.1.P.1 Program pembangunan Stasiun Hidrologi Listrik Skala Kecil (Mikrohidro)	Terbangunnya Stasiun Hidrologi Listrik Skala Kecil (Mikrohidro)	Peningkatan pemanfaatan sumber energi lainnya dalam memenuhi kebutuhan listrik skala kecil.						APBD Swasta CSR	Dinas Perindustrian dan Energi

5. PENUTUP

Dokumen Rencana Induk *Smart City* Kota Bogor atau yang sering disebut dengan Dokumen-2 ini disusun dengan tujuan menjadi salah satu referensi pembangunan kota cerdas berkelanjutan bagi Kota Bogor.

Di dalam dokumen ini dibahas arah pembangunan *Smart City* daerah dan kaitannya dengan ISO 37120:2018, ISO 37122:2019 dan Kepmendagri No.050-5889 Tahun 2021, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan strategi pembangunannya berdasarkan enam dimensi *Smart City* dan sub dimensi yang diadopsi, yang di dalamnya dirumuskan program dan kegiatan relevan yang diturunkan dari sasaran serta strategi yang harus dirumuskan berdasarkan sasaran tiap sub dimensi. Selanjutnya setiap program dan kegiatan dipetakan rencana aksi serta peta jalan untuk jangka pendek dan jangka menengah.

Dokumen ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen sebelumnya yang membahas analisis strategi dari Kota Bogor. Data yang diadopsi dari dokumen ini diambil dari berbagai sumber, namun sumber utama adalah masukan dari kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Induk *Smart City* yang beberapa kali diselenggarakan di lingkungan Pemkot Bogor.

Semoga Dokumen Rencana Induk *Smart City* ini dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan dan kemajuan Kota Bogor yang memiliki visi *Smart City*:

“Terwujudnya Kota Bogor sebagai Kota warisan budaya yang cerdas dan sejahtera pada tahun 2027”